

**KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG
BAHARI TAMBAK LOROK**

T E S I S



Disusun oleh :

PUTUT CAHYO NUGROHO

NIM. 30000215420040

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK

Disusun Oleh

Putut Cahyo Nugroho
30000215420040

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.
NIP. 197508112000121001

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan



Dr. R. B. Sularto, S.H., M.Hum.
NIP. 196701011991031005



Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.
NIP. 197508112000121001

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK

Disusun oleh :

PUTUT CAHYO NUGROHO

NIM. 30000215420040

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

Prof. Dr. Ir. Sri Puryono M.P.



Anggota

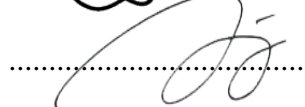
1. Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si



2. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si



3. Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.



PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2020



PUTUT CAHYO NUGROHO
NIM. 30000215420040

ABSTRAK

Rencana penataan lingkungan Kawasan Tambak Lorok secara makro atau menyeluruh berisi kawasan-kawasan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai kriteria permasalahan dan potensi penataan dari kawasan-kawasan yang terdapat di Kawasan Tambak Lorok. Kehadiran Penataan Kawasan Kampung nelayan di Tambak Lorok pada awalnya sudah masuk dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan program pemerintah pusat dimana Pemerintah Kota masuk dalam salah satu kota yang terpilih dalam program tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk analisis kebijakan Pemeirntah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari Tambak Lorok.

Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey. Penelitian ini dilakukan pada kawasan Tambak Lorok Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Metode pengumpulan data di sini maksudnya adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar dalam pengumpulan atau penggalian data dapat dipertanggungjawabkan dan betul-betul akurat, benar, dan tidak menyeleweng baik sebelum penelitian maupun selama penelitian.

Hasil analisis menunjukkan Program yang dikembangkan pada Kawasan Tambak Lorok sebagai sangat rentan dengan rob dan penurunan tanah. Perencanaannya tertuang pada dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Tambaklorok Tahun 2015. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perlu untuk melakukan peninjauan secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi alamiah kawasan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala, karena akses lingkungan yang sempit menyebabkan bahan-bahan material hanya bisa diturunkan di jalan besar, hal ini selain menghambat progress pekerjaan, juga menyebabkan biaya tambahan untuk langsir material ke lokasi yang akan dibangun dibebankan kepada wilayah tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan Publik, Kampung Bahari, Program Kota Tanpa Kumuh*

ABSTRACT

The environmental planning plan for Tambak Lorok Area in a macro or comprehensive manner contains identified areas based on various criteria for problems and potential arrangement of areas in the Tambak Lorok area. Initially, the presence of the Fishing Village Area Arrangement in Tambak Lorok was included in the KOTAKU (City Without Slum) Program, which is a central government program where the City Government is included in one of the cities selected in the program. This research is focused on the analysis of Semarang City Government policies in the implementation of Kampung Bahari Tambak Lorok.

In conducting this research based on the formulation of the problem, this type of research is descriptive qualitative-quantitative or applied research which includes survey research. This research was carried out in the Tambak Lorok area, Tanjungmas Village, North Semarang District, Semarang City. The data collection method here means a way to obtain the data needed in the field. This is done so that data collection or extracting can be accounted for and truly accurate, correct, and does not deviate either before the research or during the research.

The analysis shows that the program developed in the Tambak Lorok area is very vulnerable to tidal flooding and land subsidence. The planning is contained in the 2015 Tambaklorok Area building and environmental planning document. The document states that it is necessary to conduct periodic reviews adjusted to the natural conditions of the area. In its implementation, there are obstacles, because the narrow environmental access causes materials to be unloaded only on major roads, this is not only hampering the progress of work, but also causing additional costs for shifting materials to the location to be built to be borne by the area.

Keywords : *Implementation, Public Policy, Kampung Bahari, City Without Slum Program*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya karena limpahan rahmat dan karunia-Nya tesis ini terselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister pada Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul, **“Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Implementasi Kampung Bahari Tambak Lorok”**.

Pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berperan dalam penyelesaian tesis ini, terutama yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono M.P. selaku Ketua Sidang/Penguji I yang dengan penuh kesabaran telah memberi koreksi dan masukan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si selaku Dosen Penguji II yang dengan penuh kesabaran telah memberi koreksi dan masukan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si selaku Dosen Penguji III yang dengan penuh kesabaran telah memberi koreksi dan masukan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji IV yang dengan penuh kesabaran telah memberi koreksi dan

masukannya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman seperjuangan satu angkatan yang selalu memberi dorongan kepada penyusun sehingga penyusun bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Semua pihak yang telah memberikan dorongan baik moril, materiil maupun spiritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Akhir kata penyusun berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 30 Desember 2020

Penyusun



PUTUT CAHYO NUGROHO

NIM. 30000215420040

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hasil Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Berpikir	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Permukiman Kumuh	12
B. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam RT/RW Kota Semarang	14
C. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas	16
D. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan	17
E. Kebijakan Publik	19
F. Implementasi Kebijakan Publik	22
G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan	29
H. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu	30
I. Pemahaman Rencana Pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Gambaran Umum Kawasan Tambak Lorok	46
B.	Kedudukan Kawasan Tambak Lorok dalam RT RW Kota Semarang	61
C.	Strategi Pemerintah Kota Semarang terkait Penataan dan Pengembangan Kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari	70
D.	Dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap Masyarakat Tambak Lorok	104
BAB V	PENUTUP	114
A.	Kesimpulan	114
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Tanjung Mas 2015	55
Tabel 4.2 Material Hunian di Kawasan Tambak Lorok	106
Tabel 4.3 Perbaikan Hunian di Tambak Lorok	106
Tabel 4.4 Pavingisasi Jalan Per RT	108
Tabel 4.5 Penggunaan MCK di Kawasan Tambak Lorok	112

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
Gambar 1.1 Skema Maksud dan Tujuan Penelitian	5
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir	11
Gambar 2.1 Masterplan Pelabuhan Tanjung Emas Water Kolam Pelabuhan	16
Gambar 2.2 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan	20
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan	23
Gambar 2.4 Model Implementasi Edward III	29
Gambar 2.5 Strategi desain Kampung Bahari Tambaklorok	39
Gambar 2.6 Diagram strategi desain Kampung Bahari Tambak Lorok	40
Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Tambak Lorok	46
Gambar 4.2 Gambaran Kondisi Kawasan Tambak Lorok	49
Gambar 4.3 Kondisi Bangunan, Jalan Lingkungan dan Drainase	58
Gambar 4.4 Kondisi Persampahan Yang Tidak Tertangani	59
Gambar 4.5 Kondisi Fasilitas Ekonomi Pasar Tradisional	60
Gambar 4.6 Peta Administratif Kawasan Tambak Lorok	66
Gambar 4.7 Peta Konstelasi Tambak Lorok	72
Gambar 4.8 Zona-Zona Kampung Wisata Bahari	73
Gambar 4.9 Rencana Aksesibilitas Kampung Wisata Bahari	75
Gambar 4.10 Potret Kawasan Tambaklorok Sebelum Dilakukan Penataan .	79
Gambar 4.11 Konsep Perencanaan Kawasan Dan Zonasi Kampung Bahari Tambaklorok	80
Gambar 4.12 Fokus Lokasi Penelitian atau Focus Implementasi Kebijakan .	81
Gambar 4.13 Foto Udara Kali Banger mati sebelum dilakukan penataan	82
Gambar 4.14 Lokasi Rencana Pasar	84
Gambar 4.15 Desain Site Plan Rencana Pasar	85
Gambar 4.16 Desain 3D Pasar	85
Gambar 4.17 Lokasi Rencana RTH	86
Gambar 4.18 Siteplan RTH	87
Gambar 4.19 Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek Pasar	88
Gambar 4.20 Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 1 .	89
Gambar 4.21 Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 2 .	90
Gambar 4.22 Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 3 .	91
Gambar 4.23 Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 4 .	92
Gambar 4.24 Cara Pembuangan Sampah di Tambak Lorok	109
Gambar 4.25 Sumber Air Bersih Tambak Lorok	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang hidup secara harmonis (*living in harmony*) dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari dengan menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan komunitas menuju tatanan masyarakat Madani merupakan upaya untuk membantu penghuninya bertanggung jawab membangun hubungan-hubungan dengan komunitas yang lebih luas dan bahkan dengan lingkungan permukiman mereka secara harmonis.

Tambak Lorok merupakan kawasan yang masuk dalam Perencanaan Berbasis Komunitas di Kota Semarang yang telah melalui berbagai proses, mulai proses persiapan hingga tahap perencanaan partisipatif. Rencana penataan lingkungan Kawasan Tambak Lorok secara makro atau menyeluruh berisi kawasan-kawasan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai kriteria permasalahan dan potensi penataan dari kawasan-kawasan yang terdapat di Kawasan Tambak Lorok. Dalam kawasan tersebut dijadikan sebagai prioritas utama untuk dapat diintervensi secara fisik melalui kesepakatan masyarakat.

Proses perancangan elemen fisik pada pembangunan sarana lingkungan dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak tersebut sehingga muncul berbagai keragaman bentuk fisik. Untuk memperoleh kualitas lingkungan

yang sesuai dengan yang dikehendaki maka dilakukan pendekatan rancang bangun kawasan yang dalam lingkup tata kota dikenal sebagai rancang kota (*urban design*).

Dengan demikian, agar program dapat berjalan berdasarkan pada tujuan yang jelas, baik target maupun sasarannya, maka dapat disusun program pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang serta menentukan langkah-langkah pengendaliannya setelah melalui proses analisa atau penilaian dari segala aspek. Dalam penentuan target maupun sasaran yang tepat dari suatu pembangunan prasarana/sarana di suatu kawasan diperlukan data dan informasi berkaitan dengan program dan pelaksanaan pembangunan bidang permukiman di kawasan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya arahan terhadap penataan lingkungan permukiman serta melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaannya yang tertuang dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Kehadiran Penataan Kawasan Kampung nelayan di Tambak Lorok pada awalnya sudah masuk dalam Program *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* yang merupakan program pemerintah pusat dimana Pemerintah Kota masuk dalam salah satu kota yang terpilih dalam program tersebut. Sebagai Ibukota Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.175.092 juta jiwa, Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh 415,83 Ha yang tersebar di 62 kelurahan.

Program *KOTAKU* yang didalamnya terdapat program Kampung Bahari, memiliki tujuan untuk mensukseskan target 0 persen kawasan kumuh pada 2019, menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti akses air minum, belum tersedianya sanitasi yang layak serta sampah yang tidak didaur ulang. Pemerintah telah menyusun berbagai program, mulai dari Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), hingga *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase* (NUSP Phase 2). (Prabowo, Dani. "Tiga Jokowi Berkuasa Penanganan Kawasan Kumuh belum maksimal". Kompas.com)

Kebijakan yang ideal tidak akan menjadi kebijakan yang baik apabila tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014). Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab mengatur, membina dan mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan di wilayahnya. Tujuan pengembanan kawasan adalah untuk membangun dan mengembangkan wilayah tersebut berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Sekitar tahun 1950 pada kawasan ini muncul sebuah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Fenomena yang ada bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan ini

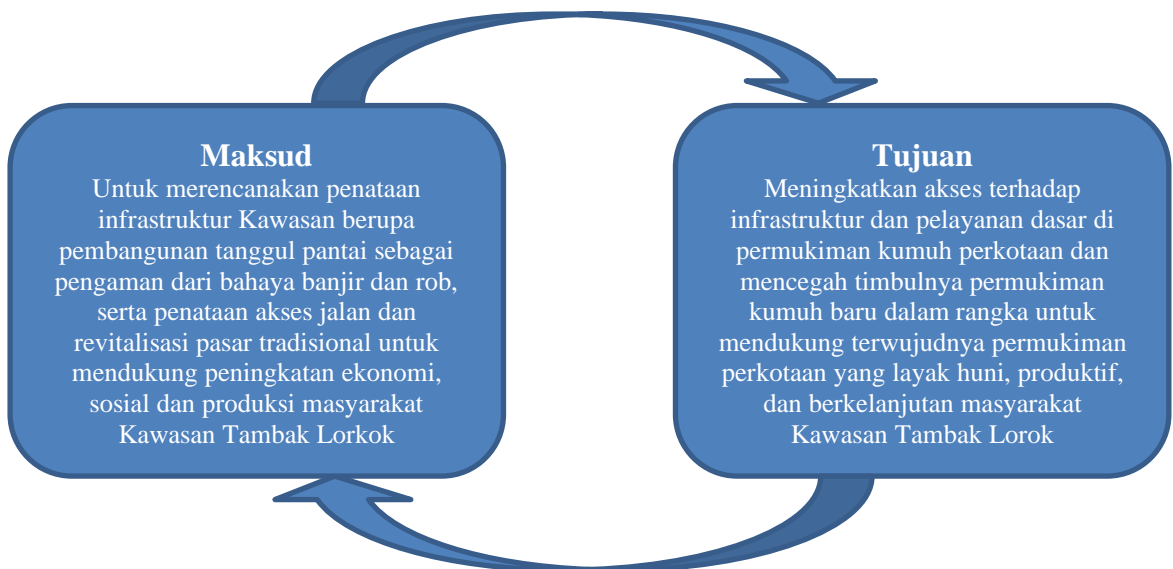
memiliki ketergantungan terhadap *Natural Resources* (sumber alam) yaitu laut sebagai tempat mencari ikan, sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan keluar masuknya perahu ke laut. Oleh karena, fenomena ini telah menyatu dengan kehidupan kebudayaan masyarakat serta berlangsung turun menurun maka pemukiman ini lebih dikenal dengan pemukiman nelayan (Aziz, dkk, 2007).

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktivitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Sebuah konsep perencanaan penataan kawasan, bangunan dan lingkungan di Kawasan Tambak lorok Kota Semarang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang terus menerus terjadi di Kawasan Tambak Lorok. Kampung Tambak Lorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas \pm 84,48 ha, dengan wilayah Tambakmulyo di sebelah barat dan

Tambakrejo di sebelah Timur. Potensi utama adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang didalamnya sekaligus terdapat TPI.

Guna mewujudkan rencana pengembangan kawasan baru di Kampung Bahari, maka diperlukan konsep dan perencanaan terkait prasarana dan utilitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kawasan tersebut bebas dari pengaruh air laut pasang (rob) dan konsep pengendalian banjir kawasan terintegrasi dengan konsep penataan bangunan yang sinergi dengan penataan lingkungan di Kawasan Kampung Bahari dan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Mas.



Gambar 1.1. Skema Maksud dan Tujuan Penelitian

Perencanaan kawasan kampung bahari mengandung pengertian bahwa kehidupan bermukim masyarakat di Kawasan Tambak Lorok harus mencirikan kelautan (maritim). Dua hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambak Lorok yaitu morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Morfologi kawasan saat ini terbentuk secara

tidak teratur, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (*slum area*). Oleh karena itu, dalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu: *Urban community*, permukiman unik dan *sea front landscaping scheme*.

Berdasarkan konsep pengembangan kampung bahari Tambak Lorok ada 6 zona pengembangan yaitu :

1. Zona Permukiman

Terdapat di kawasan Tambak Lorok bagian barat (wilayah Tambak Mulyo), dimana karakter perkampungan tetap dijaga dengan blok-blok massa yg berdekatan, karena ruang yg tercipta diantara bangunan merupakan ruang publik sekaligus ruang interaksi antar sesama penghuni.

2. Zona Permukiman Vertikal

Zona yang dikembangkan pada area reklamasi (*disposal area*) di sisi selatan. Pengembangan permukiman vertikal dilakukan dengan tetap memertahankan suasana kampung yang dinamis dan fleksibel disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

3. Zona Perdagangan dan Jasa

Dikembangkan pada aera di sepanjang koridor Jalan Tambak Mulyo. Pada kawasan ini dilakukan penataan dan peningkatan kualitas koridor kawasan, dimana pada kondisi eksisting kawasan ini memang telah berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa.

4. Zona Wisata Bahari dan Kuliner

Dikembangkan di kawasan Tambak Rejo. Pada zona ini, kawasan permukiman didesain dengan karakter yang menginspirasi, seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung bahari dengan tetap bercorak waterfront house.

5. Zona Pelabuhan Rakyat dan Industri Maritim

Dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, yaitu dengan adanya PPI (dan TPI) Tambaklorok dan pasar sebagai pusat distribusi hasil laut. Selain itu dikembangkan pula industri maritim untuk mendukung aktivitas kebaharian di kawasan Tambak Lorok.

6. Zona Konservasi

Merupakan zona konservasi mangrove yang dikembangkan di beberapa titik di kawasan perenanaan terutama di ujung timur area industri maritim atau di daerah dekat bekas TPI Tri Mulyo. Pengembangan zona konservasi mangrove bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambak Lorok.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan implementasi Kampung Bahari di Kawasan Tambak Lorok, maka penelitian ini mengambil judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Kawasan Tambak Lorok dalam RTRW Kota Semarang?
2. Bagaimana strategi pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari?
3. Bagaimana dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap masyarakat Tambak Lorok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Kawasan Tambaklorok dalam RTRW Kota Semarang
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Semarang terkait penataan dan pengembangan kawasan Tambak Lorok
3. Untuk mengetahui dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap masyarakat Tambaklorok

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu lingkungan dalam ilmu tata pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan

pembangunan wilayah khususnya kebijakan dalam Implementasi Kampung Bahari.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang, dalam implementasi kampung bahari, serta sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kampung bahari.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan holistik, maka dilakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang dianggap relevan.

Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya, diantaranya :

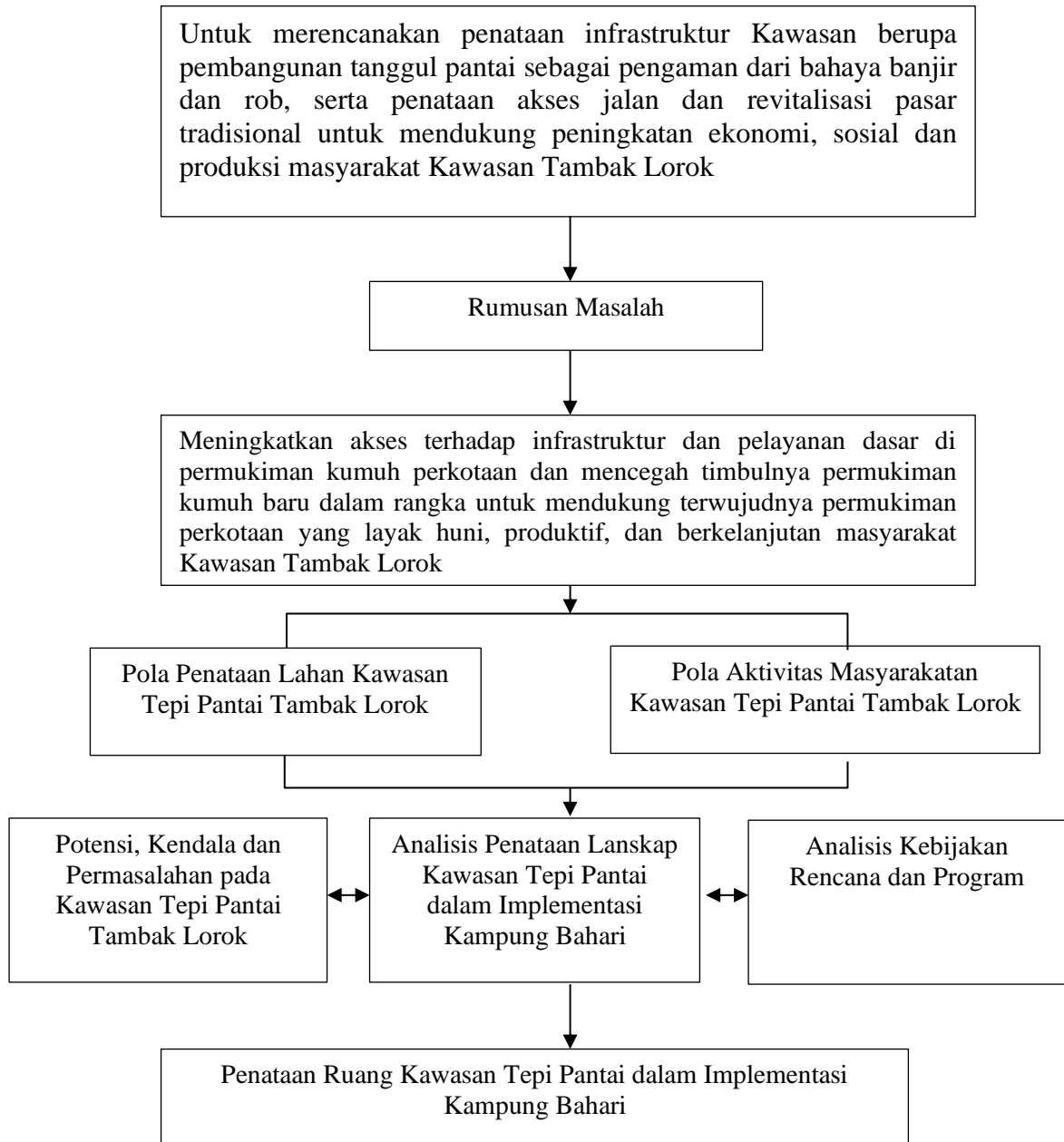
1. Purnamasari (2011) Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan.
2. Zamzami (2016) Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari. Pengembangan masyarakat nelayan melalui penguatan pranata sosial perikanan

merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama nelayan untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan nelayan akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan nelayan, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi. Keberhasilan penerapan suatu pranata sosial nelayan tidak semata-mata diukur dengan nilai tambah ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran dan fungsi nilai-nilai sosio-kultural secara utuh.

3. Berkahti, (2015) Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis. Masalah-masalah yang dianggap kecil dalam birokrasi pemerintah kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan wisata bahari di pantai Selatbaru kurang berkembang. strategi pengembangan pantai Selatbaru dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Kerangka Berpikir

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Permukiman Kumuh

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Adisasmita, 2010). Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo, 2005). Dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan perumahan permukiman (*development of human settlement*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. *Growth of density* (Pertambahan jumlah penduduk)

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2. *Urbanization* (Urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kawasan pusat kota (*down town*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Wilayah kampung yang dapat disebut sebagai kampung kumuh banyak dijumpai pada wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan daratan dan lautan yang memiliki potensi besar bagi pengembangan sektor kemaritiman dan pariwisata. Oleh karena potensinya sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, kawasan pesisir mulai bertransformasi menjadi permukiman yang dihuni oleh mayoritas nelayan. Namun demikian, paradigma kemiskinan pada wilayah pesisir masih cukup tinggi. Akibatnya, kampung nelayan berkembang semakin padat dan tidak tertib, sehingga membentuk kantong-kantong permukiman kumuh.

Wilayah pesisir yang berkembang menjadi kawasan permukiman memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana tidak hanya meliputi aspek sosial, ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek budaya dan politik.

B. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam RT/RW Kota Semarang

Dalam sistem Kota Semarang, perencanaan kawasan tidak dapat terlepas dari RTRW Kota Semarang sebagai pedoman perencanaan kota. Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 mengatur tentang arahan perencanaan kawasan. Berdasarkan RTRW Kota Semarang, Kawasan Tambaklorok termasuk ke dalam wilayah BWK III dan merupakan bagian dari transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas.

Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional. Rencana peningkatan kualitas pelabuhan juga didukung dengan penanganan masalah rob dan penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mampu mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.

Kawasan Tambaklorok terletak tepat bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan pelabuhan sekaligus kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota. Sehingga Kawasan Tambaklorok harus dapat mendukung fungsi pelabuhan laut.

Beberapa arahan pengaturan kawasan sebagaimana diamanatkan didalam RT RW Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan
2. Diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan
3. Mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.

Berkaitan dengan karakteristik masyarakat nelayan di Kawasan Tambaklorok, tentunya tidak dapat dilepaskan dari laut sebagai orientasi kawasan dan aktivitas utamanya. Lokasi yang berada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan tepat berbatasan dengan kolam pelabuhan, menyebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam aktivitas masyarakat nelayan dan pengembangan kawasan. Beberapa arahan pengaturan kegiatan laut pada kawasan sesuai dengan Pasal 112 ayat (3) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
2. Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
3. Pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan;
4. Diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
5. Kegiatan yang diizinkan di kawasan pelabuhan hanya yang mendukung fungsi kepelabuhanan.

C. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga perencanaan Kawasan Tambaklorok harus mempertimbangkan perencanaan kawasan pelabuhan. Perencanaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.



Gambar 2.1. Masterplan Pelabuhan Tanjung emas Water Kolam Pelabuhan

Didalam masterplan Pelabuhan Tanjung Emas, telah diatur zonasi keruangan pelabuhan. Kawasan Tambaklorok direncanakan dengan fungsi sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Meskipun lokasi Kawasan Tambaklorok berada di luar break. Jika

dilihat secara lebih detail, maka kawasan Tambaklorok ini nantinya akan berada di dalam *wallbreakwater* dari kolam pelabuhan. Saat ini, pembangunan *wall breakwater* tersebut sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai terbangun di bagian barat. Jika *wall breakwater* ini selesai dibangun sepenuhnya, maka akses keluar masuk kapal nelayan harus dipertimbangkan. Kegiatan keluar masuknya kapal di kawasan kolam pelabuhan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain.

Kegiatan nelayan ini harus dilaksanakan di luar Kawasan kolam pelabuhan. Kondisi saat ini akses keluar masuk perahu nelayan masih melintasi kolam pelabuhan. Jika mengacu kepada masterplan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka ketika wall breakwater tersebut selesai dibangun akses perahu nelayan akan ditutup dan harus dipikirkan mengenai akses laut dari dan menuju Kawasan Tambaklorok.

Berkaitan dengan Kawasan Pelabuhan, pada dasarnya lokasi bermukimnya masyarakat di Tambaklorok dahulu merupakan lahan milik pelabuhan, yaitu PT. Pelindo. Sementara itu, di lain pihak masyarakat sudah banyak yang memiliki status lahan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2015, pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas telah menerbitkan pelepasan hak dari Hak Pengelolaan Lahan bagi lahan yang telah bersertifikat hak milik.

D. Kedudukan Kawasan Tambaklorok Dalam Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

Perumusan visi awal didasarkan pada konsep pengembangan kawasan sebagai kampung bahari. Kampung bahari berdasarkan kebijakan pembangunan Kota Semarang didefinisikan sebagai “Sebuah Jalinan Perikehidupan Masyarakat Tambaklorok sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan antara sistem hunian, sistem mata pencaharian, dan lokasi tempat tinggal yang berbasis kelautan (Maritim)”.

Berdasarkan definisi tersebut, perumusan visi perencanaan Kawasan Tambaklorok mengacu pada visi pengembangan kawasan berdasarkan arah kebijakan pemerintah Kota Semarang, yaitu “Terwujudnya Kawasan Tambaklorok Sebagai Kampung Bahari yang Berbasis Pada Lingkungan Ekonomi Lokal yang Maju, Asri dan Sejahtera”. Visi pengembangan kawasan tersebut, memiliki penjelasan yaitu :

1. Kawasan Tambaklorok merupakan kawasan permukiman masyarakat yang berdekatan dengan tepian laut akan menjadi sebuah kampung bahari dengan peningkatan kualitas kehidupan, serta perbaikan tingkat ekonomi, sosial dan lingkungan.
2. Kampung Bahari Tambaklorok akan menangkap irama dan semangat kelautan nusantara bagi masyarakatnya untuk mengembangkan diri dalam hal bermukim, mengeksplorasi dan mengolah kekayaan laut serta berinteraksi sebagai sebuah entitas sosial.
3. Kampung Bahari Tambak Lorok akan menjadi tujuan wisata baru yang memikat karena keunikan budaya baharinya yang hidup (*living maritime culture*), memiliki perlengkapan amenities dasar yang cukup, prasarana fisik yang memadai dan arsitektur permukimannya yang menginspirasi.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi perencanaan kawasan dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan
2. Memanfaatkan potensi reklamasi sebagai kegiatan ekonomi
3. Melakukan program pemberdayaan

4. Melakukan pelatihan & penyuluhan guna mendorong kapasitas masyarakat, dan mewujudkan permukiman yang berkelanjutan
5. Perencanaan kawasan sebagai suatu kampung bahari mengandung pengertian bahwa kehidupan bermukim masyarakat di Kawasan Tambaklorok haruslah mencirikan kelautan (maritim).

Terdapat 2 (dua) hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambaklorok. Kata kunci dari konsep perencanaan ini adalah transformasi, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Dua hal utama yang mendasari adalah morfologi yang membentuk kawasan dan faktor ekonomi. Morfologi kawasan saat ini terbentuk secara tidak teratur, sporadis dan organik, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. Sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (*slum area*). Oleh karena itu, didalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan akan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu *Urban Community*, *Permukiman Unik* dan *Sea Front Landscaping Scheme*.

E. Kebijakan Publik

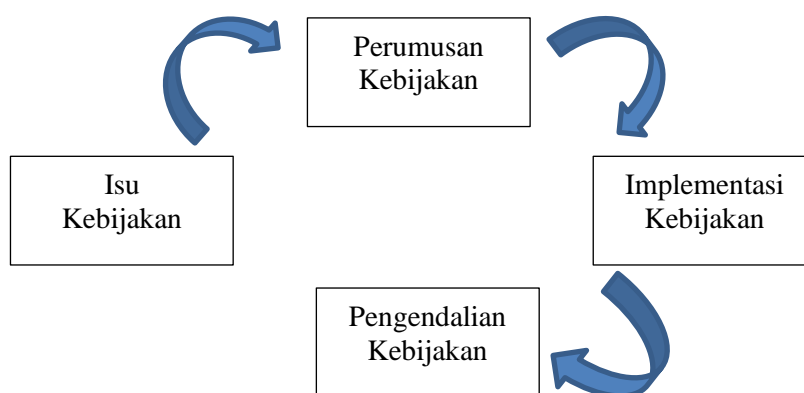
Dye dalam Nugroho (2014:519) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda merupakan pemahaman yang paling banyak dikembangkan. Dye mengemukakan:

“Public policy is whatever government choose to do or not to do. Government do many things. Note that we are focusing not only on

government action but also on government in action, that is, what government choose not to do. We contend that government in action can have just as great an impact on society as government action. public policy is what government do, what they do it, and what difference it makes.”

Definisi diatas dapat diartikan kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah melakukan banyak hal. Fokus tidak hanya pada tindakan pemerintah tetapi juga pada pemerintah dalam tindakan yaitu apa yang pemerintah memilih untuk tidak melakukannya. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah, apa yang mereka lakukan itu dan apa bedanya. Pendapat ini belum cukup memberikan batasan-batasan yang jelas dan tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan sebagai berikut :



Sumber : Nugroho (2014:199)

Gambar 2. 2 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan dari pada antisipasi ke depan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai

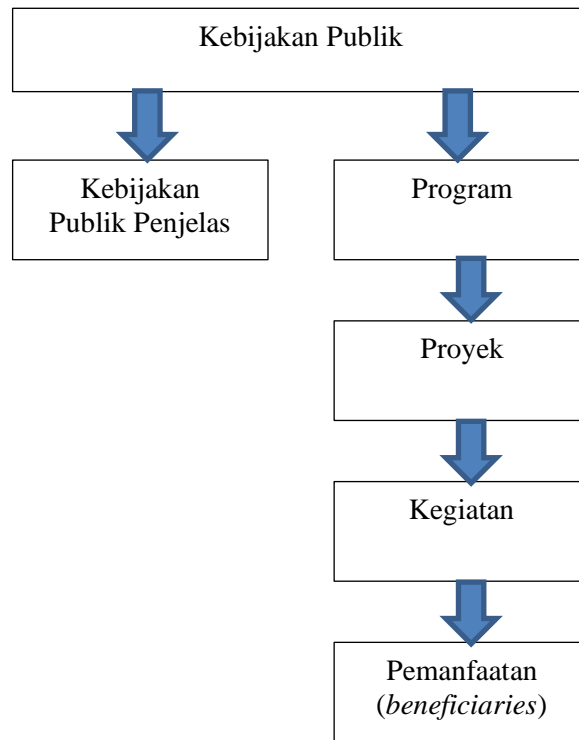
apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaatnya.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

F. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2014:657). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Hal ini juga dinyatakan oleh David (2004:246) kebijakan hendaknya dinyatakan secara tertulis. Maka sebuah kebijakan akan memiliki kekuatan hukum jika dinyatakan dalam bentuk produk formal.

Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia, yang masih menganut model *continentalist*, dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Winarno (2012:133)

Gambar 2. 3 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:133). Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan strategi yang diorientasikan dalam bentuk kebijakan (Wheelen dan Hunger, 2012:322). Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lai-lain.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III (1980) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III (1980) sebagai berikut :

a) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan

hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b) Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill* / kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini

membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

c) Disposisi atau Sikap

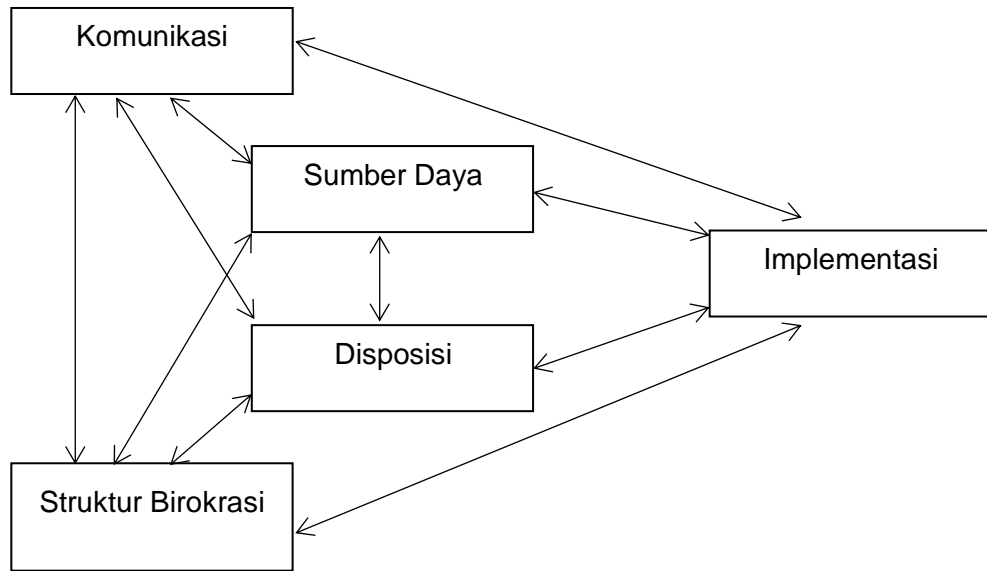
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d) Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline program/kebijakan*. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang

jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan *mark up* dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George C Edward III ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Sumber : Edward III, 1980: 48

Gambar 2. 4 Model Implementasi Edward III

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987). Selanjutnya Bengen (2004) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional. Visi pembangunan berkelanjutan tidak

melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam. Dengan demikian generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.

Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe et al., (1994) menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integritas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia.

H. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimaksud dengan sumberdaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan pada hakekatnya mempunyai makna yang sama dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Dahuri et al. (2001) berpendapat bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Cicin-Sain dan Knecht (1998) menyatakan bahwa pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Secara teknis didefinisikan bahwa suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termasuk tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) yaitu kemampuan suatu kawasan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa menimbulkan kerusakan pada kawasan pesisir.

Konteks keterpaduan (*integration*) mengadung tiga dimensi yakni dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu dan dimensi keterkaitan ekologis (Dahuri, 2004).

- 1) Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

- 2) Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan berbagai bidang ilmu.
- 3) Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia (*up lands areas*) maupun lautan lepas (*oceans*). Keterpaduan diperlukan karena memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (*ecological linkage*) yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir.

Dari sudut pandang profesional di bidang lingkungan, kepentingan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dapat dijawab dengan tiga latar belakang, yakni: Keberadaan agenda nasional, manfaat teoritis, dan nilai instrumental. Faktor awal yang mendasari permintaan data dan informasi D3TLH adalah digaungkannya agenda penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). RPPLH yang memiliki kedudukan sebagai haluan dasar dari kebutuhan akan informasi D3TLH memiliki empat muatan utama, yaitu:

1. Penilaian pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Secara teoritis, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Makna daya dukung lingkungan adalah adanya supply (ketersediaan) dari alam dan lingkungan serta adanya demand (kebutuhan) dari manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan tujuan interaksinya adalah tercapainya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Makna daya tampung lingkungan hidup adalah adanya supply atau kapasitas penampungan atau penyerapan di alam dan lingkungan, serta adanya demand atau hasil produksi dan eksek dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan interaksinya adalah kemampuan alam dan lingkungan untuk menampung atau menetralkan buangan atau eksek dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan alam. Mengacu kepada empat muatan utama RPPLH, penggunaan data dan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) baik untuk kepentingan perencanaan maupun evaluasi sebenarnya sangat mudah, akan tetapi dibutuhkan keterampilan dalam menggunakan aplikasi *Geographical Information System* (GIS).

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) berbasis jasa ekosistem memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim akan menghasilkan indikasi potensi sumberdaya alam di daerah yang akan bermanfaat sebagai:

1. Acuan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Muatan dalam penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik KLHS untuk RTRW maupun RPJMD;
3. Indikator pada instrumen pengendalian lingkungan hidup;
4. Informasi dan pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan;
5. Prediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan;
6. Arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai D3TLH dan minimalisasi risiko lingkungan;
7. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan;
8. Bahan evaluasi suatu produk perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, kajian D3TLH diharapkan mampu menjadi instrumen yang memiliki fungsi optimal dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

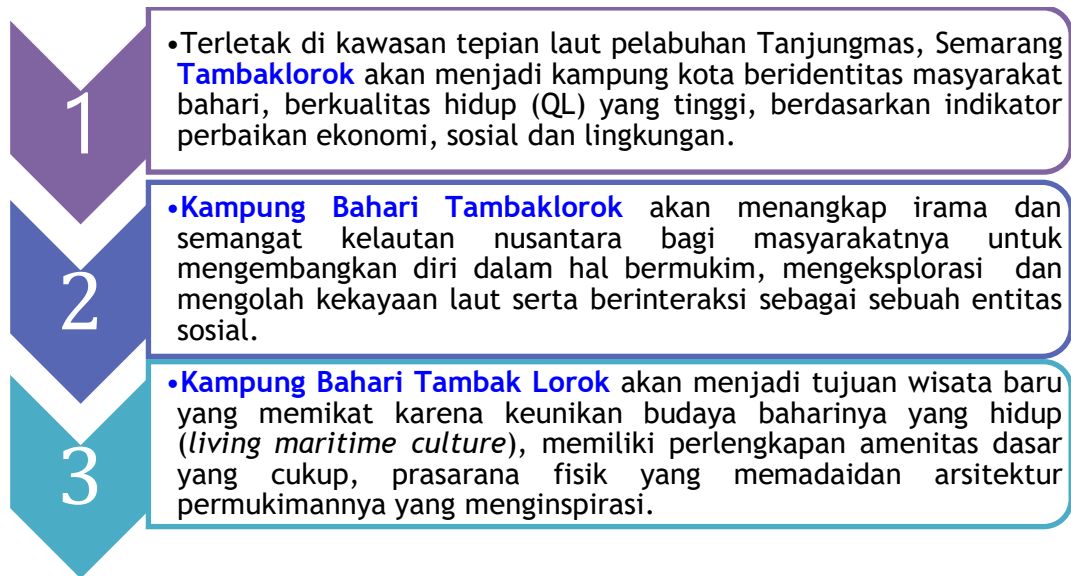
I. Pemahaman Rencana Pengembangan Kampung Bahari Tambak Lorok

Uraian pemahaman rencana pengembangan diharapkan sebagai suatu acuan dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peremajaan kawasan pada lingkungan permukiman dalam merancang Kampung Bahari.

1. Visi dan Misi Awal Pengembangan Kawasan

Perumusan visi awal didasarkan pada konsep pengembangan kawasan sebagai kampung bahari. Kampung bahari berdasarkan kebijakan pembangunan Kota Semarang didefinisikan sebagai “Sebuah Jalinan Perikehidupan Masyarakat Tambaklorok sebagai suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan antara sistem hunian, sistem mata pencaharian, dan lokasi tempat tinggal yang berbasis kelautan (Maritim)”.

Berdasarkan definisi tersebut, perumusan visi perencanaan Kawasan Tambaklorok mengacu pada visi pengembangan kawasan berdasarkan arah kebijakan pemerintah Kota Semarang, yaitu “Terwujudnya Kawasan Tambaklorok Sebagai Kampung Bahari yang Berbasis Pada Lingkungan Ekonomi Lokal yang Maju, Asri dan Sejahtera”, mendefinisikan visi tersebut, penyusunan Kawasan Polder Tambaklorok adalah sebagai berikut :



Guna mewujudkan visi tersebut, maka misi perencanaan kawasan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan
- b. Memanfaatkan potensi reklamasi sebagai kegiatan ekonomi
- c. Melakukan program pemberdayaan
- d. Melakukan pelatihan & penyuluhan guna mendorong kapasitas masyarakat, dan mewujudkan permukiman yang berkelanjutan

2. Konsep Dasar Perencanaan Kawasan Polder

Kehidupan masyarakat di Kawasan Polder Tambak Lorok haruslah mencirikan kelautan (maritim). Terdapat 2 (dua) hal utama yang mendasari konsep perencanaan Kawasan Tambaklorok. Kata kunci dari konsep perencanaan ini adalah **transformasi**, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Dua hal utama yang mendasari adalah **morfologi** yang membentuk kawasan dan **faktor ekonomi**. Morfologi kawasan saat ini

terbentuk secara tidak teratur, sporadis dan organik, serta merupakan kawasan permukiman yang tumbuh tidak terencana. sementara itu, dari aspek ekonomi mencirikan kawasan yang miskin, kotor dan kumuh (*slum area*). Oleh karena itu, didalam perencanaan kawasan konsep perencanaan kawasan akan ditekankan pada 3 (tiga) kata kunci yaitu *Urban Community*, Permukiman Unik dan *Sea Front Landscaping Scheme* seperti pada Gambar 2.5. dan Gambar 2.6. yang merupakan diagram konsep dasar transformasi dari kampung regular menjadi kampung Bahari seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.



Gambar 2.5. Strategi desain Kampung Bahari Tambaklorok

Transformasi



Gambar 2.6. Diagram strategi desain Kampung Bahari Tambak Lorok

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Adapun penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data-data substansi atau angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.

Rancangan penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian (Agung, 2004). Kedua metode tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian mengenai penataan ruang kawasan tepi pantai Mattirotasi (*city tour*) Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kawasan Tambak Lorok Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Wilayah ini terdiri dari 5 RW yaitu RW XII, RW XIII, RW XIV, RW XV dengan cakupan wilayah daerah Tambak Mulyo bagian barat, sedangkan RW XVI mencakup wilayah Tambak Rejo bagian timur. RW XII terletak berdampingan langsung

dengan Jalan Arteri Yos Soedarso lalu menuju arah utara terdapat RW XIII, XIV dan RW XV, sedangkan RW XVI terletak di sebelah timur yang dipisahkan oleh sungai Banger mati.

Penelitian dan pengamatan lapangan ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama mengingat penulis adalah bagian dari implementator kebijakan, dimulai dari pertengahan tahun 2015 sampai akhir April 2019, yang meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (*survey*) dan penelitian instansional. Waktu penelitian bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi eksternal maupun teknis penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data numerik. Data yang dikumpulkan misalnya: data jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah sarana dan prasarana wilayah penelitian, demografi dan lain sebagainya
- b. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum maupun secara rinci.

2. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Survey ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif objek studi.

- b. Data sekunder dengan observasi pada instansi terkait dengan yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di sini maksudnya adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar dalam pengumpulan atau penggalian data dapat dipertanggungjawabkan dan betul-betul akurat, benar, dan tidak menyeleweng baik sebelum penelitian maupun selama penelitian.

1. Studi observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian untuk memahami kondisi dan potensi kawasan Tambak Lorok yang menjadi objek penelitian.
2. Pendataan instansional, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui insatansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.
3. Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.
4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, lefeat/brosur objek, dan dokumentasi foto.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan pola penataan dan pemanfaatan ruang pada kawasan Tambak Lorok. Data didapatkan melalui wawancara secara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dan stakeholder yang lain dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif kualitatif ini terdapat beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah yaitu dari (Agung, 2004) :

- a. Deskripsi mengenai keinginan dan kebutuhan stakeholder pada kawasan
- b. Mengidentifikasi dan mendeskripsi pola penggunaan dan pemanfaatan lahan eksisting serta aktivitas masyarakat untuk menemukan potensi, kendala dan permasalahan pada kawasan.

2. Analisis Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan

Kebijakan harus menjadi instrumen dalam proses alokasi penataan ruang untuk menjaga keamanan dan keselamatan sosial budaya dan ekologis dalam penataan wilayah pesisir dan pulau kecil (Dahuri dalam La Sara, 2014). Analisis Kebijakan Rencana dan Program merupakan suatu

analisis dengan menjabarkan kebijakan, rencana maupun program pembangunan pada lokasi studi. Analisis ini akan menjaarkan content atau point-point penting dalam sebuah kebijakan yang mengarah pada pembangunan dan pengembangan lokasi studi. Misalnya RTRW dan rencana rincinya maupun RPJM. Analisis ini nantinya akan memperlihatkan posisi dan arahan yang tepat untuk lokasi studi.

3. Analisis Penataan Lanskap Kawasan

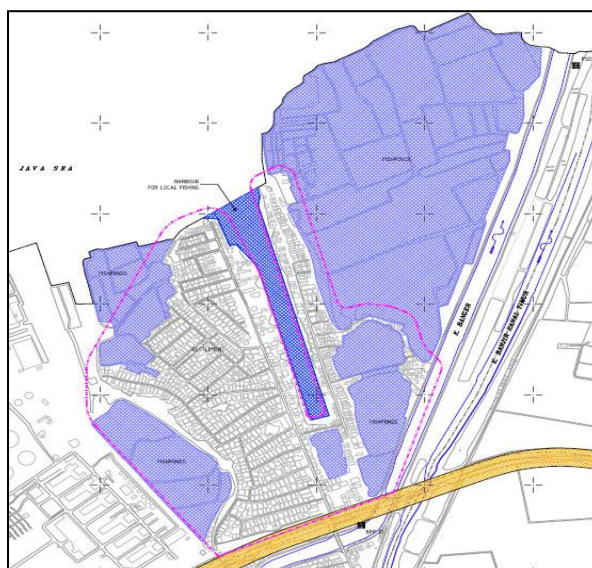
Analisis Penataan Lanskap merupakan suatu alat analisis dengan menitik beratkan pada pengembangan rencana secara lebih detail menjadi sebuah rencana lanskap (*lanscape Plan*) dengan beberapa pendekatan. Adapun analisis ini akan menghasilkan rencana ruang (*segmen*), rencana sirkulasi, serta rencana aktivitas dan fasilitas. Pada tahap ini proses analisis dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kendala yang terdapat pada kawasan. Potensi merupakan hal yang dapat dijadikan peluang sementara kendala yang menjadi penghambat akan diminimalisir atau bahkan dihilangkan/ dipindahkan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kawasan Tambak Lorok

Kampung Tambak Lorok merupakan salah satu perkampungan nelayan yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa. Fungsi utama kampung Tambak Lorok sebagai kawasan pemukiman, tambak dan perdagangan khusus hasil laut. Kampung Tambak Lorok terletak di Kelurahan Tanjung Mas di Kecamatan Semarang Utara. Kampung Tambak Lorok terletak dekat wilayah penghubung kegiatan fungsi-fungsi utama Kota Semarang, seperti kawasan pelabuhan (Pelabuhan Tanjung Emas), pergudangan, pusat kota lama, Stasiun Kereta Api Tawang serta pusat pemukiman. Keberadaan kawasan pesisir memiliki arti yang strategis. Salah satu prioritas pengembangan di wilayah pesisir antara lain peningkatan permukiman pesisir.



Gambar 4.1. Wilayah Administrasi Tambak Lorok

Kampung Tambak Lorok terletak di wilayah Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Tambak Lorok merupakan salah satu di antara kampung-kampung daerah pantai di Kota Semarang yang terletak di tepi kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banger yang memiliki total luas kawasan 46,8 Ha dengan ketinggian 0,5 mdpl rata-rata. Tambak Lorok mengalami penurunan tanah (*land subsidence*) sebesar 9-10 cm pertahun. Penggunaan lahan terbagi atas permukiman sebesar 32,4 Ha, wilayah pelabuhan 3,2 Ha, penggunaan untuk kolam/tambak 11,2 Ha dan Tambak Lorok mengalami penurunan tanah (*land subsidence*) sebesar 9-10 cm per tahun. Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Jalan Arteri Utara
- Sebelah Barat : PLTUG
- Sebelah Timur : Kali Banger

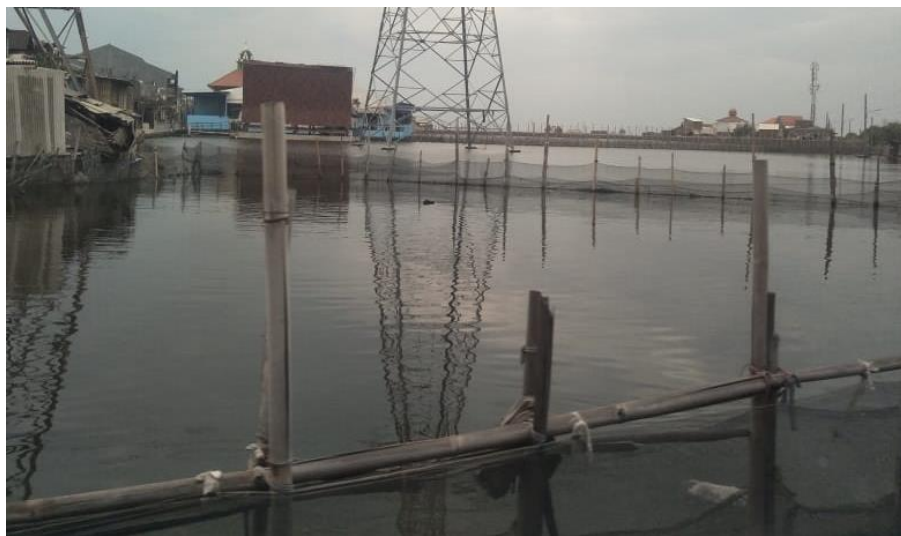
Tambak Lorok sebagian besar masyarakatnya bermata-pencarian sebagai nelayan, sehingga masyarakat di daerah ini sumber kehidupannya sangat tergantung dari hasil laut dan daerah ini juga dikenal sebagai permukiman nelayan. Keberadaan permukiman nelayan sangat berkaitan erat dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, dimana pantai ini harus mudah dicapai oleh publik dengan sistem transportasi dan jaringan jalan yang baik, diperkaya dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang mempesona tanpa harus merusak lingkungannya. Semakin meningkat pertumbuhan populasi menyebabkan

permasalahan permukiman di Desa Tambak Lorok, antara lain kepadatan dan kekumuhan.

Sebagai permukiman nelayan maka masyarakat yang bermukim di kawasan Tambaklorok ini memiliki ketergantungan terhadap Natural Resources (sumber alam) dalam hal ini laut sebagai tempat mencari ikan, sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan keluar masuknya perahu ke laut. Kehidupan ini telah menyatu dengan budaya masyarakat serta berlangsung turun menurun. Potensi utama Kawasan Tambaklorok adalah adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang didalamnya sekaligus terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Seiring perkembangan waktu, kampung ini berkembang sebagai kampung dengan kepadatan tinggi. Saat ini kampung ini mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan berupa banjir, rob, penurunan tanah dan intrusi air laut merupakan permasalahan mendasar di kawasan ini. Sampah yang menumpuk menyebabkan kawasan menjadi kumuh dan tidak sehat. Tingkat perekonomian penduduk yang rendah, menyebabkan penduduk mengalami kesulitan untuk memperbaiki lingkungannya.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Tambak Lorok adalah sebesar 30.678 jiwa yang terbagi ke dalam 5 RW, yaitu RW 12 hingga RW 16. Dari seluruh jumlah penduduk tersebut 30.675 merupakan penduduk Warga Negara Indonesia (terdiri dari 14.424 laki-laki dan 16.251 perempuan) serta 3 penduduk merupakan Warga Negara Asing (terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan). Posisinya yang berada di kawasan sekitar pelabuhan, kampung

Tambak Lorok masuk dalam kategori kawasan kumuh dengan kepadatan > 750 jiwa/Ha dan memiliki jumlah keluarga miskin mencapai 970 KK. Tambak Lorok menyumbang 36,02% kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas, dimana dari 970 KK miskin tersebut memiliki tanggungan jumlah keluarga ≤ 3 adalah 595 KK, tanggungan ≥ 4 adalah 358 KK dan tanggungan ≥ 8 adalah 16 KK. Berikut merupakan gambaran kondisi Kawasan Tambak Lorok :





Gambar 4.2. Gambaran Kondisi Kawasan Tambak Lorok

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa Kawasan Tambak Lorok telah melakukan berbagai pembangunan untuk menciptakan Kawasan Kampung Bahari untuk destinasi wisata. Perkembangan Kawasan Tambak Lorok terjadi dalam beberapa fase. Pada dasarnya, masyarakat Kawasan Tambak Lorok merupakan masyarakat nelayan karena terletak di pesisir dan memiliki sifat kebaharian yang masih sangat kental. Namun migrasi yang terjadi pada dekade 1970-an perlahan-lahan mulai merubah karakter kawasan ini. Pada dekade tersebut, mulai tumbuh industri-industri baru yang berlokasi di sekitar Kawasan Tambak Lorok, yang sebagian besar bekerja bukan sebagai nelayan. Dengan demikian, penduduk di kawasan Tambak Lorok kemudian dapat dikelompokkan sebagai penduduk nelayan dan non-nelayan. Entitas nelayan sendiri terbagi menjadi 3 tipologi, yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. Sedangkan non-nelayan terdiri dari buruh, pegawai, dan pedagang. Secara garis besar sebaran tipologi warga di kawasan tambak lorok bagian

utara, tepi kali mati dan pantai, dihuni mayoritas oleh para nelayan. Sedangkan di bagian selatan dan bagian tengah dihuni oleh non-nelayan. Selain nelayan dan penjual ikan segar maupun ikan olahan serta buruh, penduduk di Kawasan Tambak Lorok juga banyak yang bekerja sebagai pedagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang berdagang di pasar maupun membuka warung warung di rumahnya.

Sebagian besar penduduk di Tambak Lorok merupakan migran dari berbagai daerah yang menetap di Tambak Lorok. Pada awalnya penduduk tersebut berurbanisasi agar mendapat penghidupan yang lebih layak, namun karena keterbatasan kualitas serta kemampuan yang kurang memadai dalam lapangan pekerjaan maka penduduk tersebut memilih untuk berprofesi sebagai nelayan maupun buruh dengan bertempat tinggal di Tambak Lorok meskipun dengan keadaan yang sangat tidak layak untuk permukiman. Penduduk tersebut lebih memilih bertempat tinggal di Tambak Lorok karena keterbatasan ekonomi serta dekat dengan mata pencaharian. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Tambak Lorok semakin meningkat karena upah profesi nelayan maupun buruh sangat minim.

Kedudukan Kawasan Tambaklorok terhadap peraturan-peraturan terkait kebijakan pengembangan Kawasan :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Utama.

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, adalah :
 - a. BWK III, bagian dari Kawasan Transportasi Laut Pelabuhan Tanjung Emas.
 - b. Merupakan **kawasan strategis pertumbuhan ekonomi**.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, menyebutkan bahwa Kawasan Tambaklorok diluar *wall breakwater* dari kawasan Pelabuhan namun masih masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang dalam zonasinya direncanakan sebagai **kawasan pelabuhan rakyat**.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang menyebutkan bahwa Tambaklorok ditetapkan sebagai **Pelabuhan Perikanan Kelas D** yang selanjutnya disebut sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam perencanaan Tahun 2015 – 2034.

Potensi yang ada di Kawasan Tambaklorok Kelurahan Tanjung Mas adalah sebagai berikut :

1. Lokasi posisi kawasan Tambaklorok ini merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang cukup penting penting, karena aktivitas kawasan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi kota Semarang. Adanya relasi yang kuat ini menunjukkan nilai strategis kawasan, dengan orientasi laut dan kawasan sekitar sebagai sasaran aktivitas.

2. Jarak dengan orientasi laut dan kawasan sekitar sebagai sasaran aktivitas, maka jarak terhadap kawasan akan menampilkan hirarki intensitas aktivitas. Jarak lokasi kerja penduduk kawasan rata-rata kurang dari tiga km. jarak ke tempat aktivitas tersebut berkaitan erat dengan intensitas network atau jaringan kerja kawasan.
3. Sarana pencapaian Lokasi dan jarak ke tempat aktivitas sangat berpengaruh terhadap sarana pencapaian atau sarana transportasi yang digunakan. Sehubungan dengan relatif dekat jarak dan lokasi ke tempat aktivitas maka sarana pencapaian masyarakat ke tempat kerja kebanyakan ditempuh dengan berjalan kaki dan sepeda.

Kampung Tambaklorok terletak di bagian utara Kota Semarang, tepatnya disisi Utara Kecamatan Semarang Utara. Area ini hampir semuanya dikelilingi oleh Laut Jawa. Tambaklorok berada di semenanjung terdiri dari kawasan perumahan, pelabuhan dan tambak. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah masyarakat nelayan Tambaklorok memiliki ciri ketradisional yang masih melekat, terutama dapat terlihat pada metoda yang digunakan untuk usaha mereka yaitu penangkapan ikan, hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka yang minim. Kondisi inilah yang mengakibatkan terbentuknya suatu lingkungan pemukiman yang belum memenuhi aspek kesehatan, teknis, kelestarian lingkungan hidup, ekologi, dan iklim. Kondisi eksisting kawasan Tambaklorok yang merupakan target penelitian :

1. Kondisi Fisik Dasar

Identifikasi potensi dan masalah fisik merupakan penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan kota terhadap pengembangan kegiatan perkotaan. Dalam menentukan kesesuaian lahan fisik tersebut, faktor-aktor fisik ruang harus diperhitungkan secara komprehensif tanpa menghilangkan karakteristik dari beberapa faktor seperti topografi, geologi, dan hidrologi.

a. Topografi

Kondisi topografi lokasi studi mempunyai ketinggian rata-rata 0.5m diatas muka air laut rata-rata. Dengan luas area \pm 48 Ha, sebagai berikut :

- 1) Daerah pemukiman penduduk = 32.4 Ha
- 2) Daerah pelabuhan = 3.2 Ha
- 3) Daerah kolam/tambak ikan = 11.2 Ha

Penurunan tanah (*land subsidence*) pada wilayah studi sekitar 10 cm per tahun sehingga prediksi muka air rata-rata menjadi -0.4 m pada tahun 2020.

b. Geologi

Struktur geologi lokasi studi berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan dan lanau yang dalam.

c. Jenis Tanah

Jenis tanah di lokasi studi yaitu **tanah aluvial** warna tanah kelabu, coklat dan hitam. Produktifitas tanahnya rendah dan biasanya digunakan untuk pertanian utama dan permukiman.

d. Hidrologi

Adanya rencana penutupan Sungai Banger maka Kampung Tambaklorok menjadi satu sistem drainase sendiri. Catcment area wilayah studi adalah wilayah tertutup kawasan Tambaklorok yang dibatasi oleh Jalan Arteri, muara Sungai Banger dan Laut Jawa. Kondisi hidrologi yang mempengaruhi banjir pada sistem drainase Tambaklorok adalah hujan setempat dan pasang surut yang terjadi.

e. Demografi

Jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Mas pada tahun 2014 sebanyak 8.740 jiwa yang tersebar di 5 RW. Mata pencaharian sebagian besar adalah nelayan yang menambatkan kapal di sekitar perairan Tambaklorok.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Tanjung Mas 2015

No.	Rukun Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	RW 12	185	1.319
2	RW 13	239	1.459
3	RW 14	389	2.337
4	RW 15	374	2.270
5	RW 16	183	1.355
	JUMLAH	1.370	8.740

Posisinya yang berada di kawasan sekitar pelabuhan, kampung Tambaklorok masuk dalam kategori kawasan kumuh dengan kepadatan > 750 jiwa/Ha dan memiliki jumlah keluarga miskin mencapai 970 KK. Tambaklorok menyumbang 36,02% kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas, dimana dari 970 KK miskin tersebut memiliki tanggungan jumlah keluarga ≤ 3 adalah 595 KK, tanggungan ≥ 4 adalah 358 KK dan tanggungan ≥ 8 adalah 16 KK.

f. Sosial Kemasyarakatan

Pada dasarnya, masyarakat Kawasan Tambaklorok merupakan masyarakat nelayan karena terletak di pesisir dan memiliki sifat kebaharian yang masih sangat kental. Namun migrasi yang terjadi pada dekade 1970-an perlahan-lahan mulai merubah karakter kawasan ini. Pada dekade tersebut, mulai tumbuh industri-industri baru yang berlokasi di sekitar Kawasan Tambaklorok, yang sebagian besar bekerja bukan sebagai nelayan. Dengan demikian, penduduk di kawasan Tambaklorok kemudian dapat dikelompokkan sebagai penduduk nelayan dan non-nelayan. Entitas nelayan sendiri terbagi menjadi 3 tipologi, yaitu nelayan penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. Sedangkan non-nelayan terdiri dari buruh, pegawai, dan pedagang. Secara garis besar sebaran tipologi warga di kawasan Tambaklorok bagian utara, tepi kali mati dan pantai, dihuni mayoritas oleh para nelayan. Sedangkan di bagian selatan dan bagian tengah dihuni oleh non-nelayan. Selain nelayan

dan penjual ikan segar maupun ikan olahan serta buruh, penduduk di Kawasan Tambaklorok juga banyak yang bekerja sebagai pedagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang berdagang di pasar maupun membuka warung warung di rumahnya.

Sebagian besar penduduk di Tambaklorok merupakan migran dari berbagai daerah yang menetap di Tambaklorok. Pada awalnya penduduk tersebut berurbanisasi agar mendapat penghidupan yang lebih layak, namun karena keterbatasan kualitas serta kemampuan yang kurang memadai dalam lapangan pekerjaan maka penduduk tersebut memilih untuk berprofesi sebagai nelayan maupun buruh dengan bertempat tinggal di Tambaklorok meskipun dengan keadaan yang sangat tidak layak untuk permukiman. Penduduk tersebut lebih memilih bertempat tinggal di Tambaklorok karena keterbatasan ekonomi serta dekat dengan mata pencaharian. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Tambaklorok semakin meningkat karena upah profesi nelayan maupun buruh sangat minim.

2. Kondisi Sarana dan Prasana

a. Perumahan dan Permukiman

Kondisi perumahan dan permukiman di wilayah Tambaklorok adalah perkampungan yang padat penduduk. Bangunan rumah tinggal sebagian besar sudah bangunan permanen. Namun dikarenakan adanya penurunan muka tanah ± 10 Cm/Thn maka seolah-olah setiap 5 tahun sekali terjadi “perlombaan” menaikan elevasi jalan

lingkungan dan lantai dasar rumah tiap warga dengan harapan jalan lingkungan dan rumah tidak kemasukan air rob.

b. Transportasi / Jalan Lingkungan

Kondisi sarana transportasi di wilayah Tambaklorok sudah dapat terlayani dengan adanya jalan lingkungan yang berupa jalan paving lebar antar 1.5 m – 2 m dan jalan akses berupa jalan paving lebar 5 m.

c. Drainase

Sarana saluran drainase di wilayah Tambaklorok sudah ada namun kondisinya **tidak terawat** dan banyak saluran yang tidak mempunyai outfall karena saluran sudah banyak **tersumbat sedimen dan sampah**. Dimensi saluran juga tidak dapat menampung debit yang terjadi.



Gambar 4.3. Kondisi Bangunan, Jalan Lingkungan dan Drainase

d. Persampahan

Kondisi persampahan di wilayah Tambaklorok **belum tertangani dengan baik**. Produksi sampah sebagian besar adalah sampah domestik dan dari pasar serta kegiatan bongkar muat ikan.

Permasalahan sampah menyebabkan kekumuhan kawasan, bau dan kotor.



Gambar 4.4. Kondisi Persampahan Yang Tidak Tertangani

e. Air Bersih

Sarana air bersih di wilayah Tambaklorok masih memanfaatkan pengambilan air bawah tanah yang dikelola oleh beberapa individu yang kemudian disalurkan / didistribusikan ke masing-masing rumah tinggal, dengan kualitas air yang **kurang baik**. Dan ini menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Penyaluran air bersih oleh PDAM masih terganjal oleh beberapa oknum tokoh masyarakat pengelola sumur air bersih.

f. Sanitasi

Sanitasi di wilayah Tambaklorok sebagian besar sudah berupa WC dengan septick tank, namun untuk daerah yang berbatasan dengan laut ataupun genangan masih banyak sarana MCK yang **dibuang langsung ke laut**.

3. Kondisi Fasilitas / Sarana Sosial

a. Fasilitas Kesehatan

Wilayah Tambaklorok **belum mempunyai** fasilitas kesehatan yang memadai sebagian besar penduduk memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas/ puskesmas pembantu yang lokasinya di kelurahan lain, dengan jarak tempuh kurang lebih 3 – 5 km.

b. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah Tambaklorok adalah pendidikan dasar yaitu 1 SD swasta dan 1 TK swasta.

c. Fasilitas Peribadatan

Sarana fasilitas peribadatan yang ada berupa mushola dan masjid yaitu 2 masjid dan 3 mushola.

d. Fasilitas Ekonomi

Fasilitas ekonomi yang terdapat di wilayah Tambaklorok yaitu pasar tradisional dan pasar ikan, serta adanya tempat pelelangan ikan, yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Semarang.



Gambar 4.5. Kondisi Fasilitas Ekonomi Pasar Tradisional

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama di Tambaklorok adalah :

1. Penurunan permukaan tanah, yang mengakibatkan adanya genangan rob dan banjir
2. Pendangkalan alur sungai Kali Banger Lama yang menjadi sarana transportasi dan tambatan perahu nelayan
3. Drainase dan sanitasi tidak memadai
4. Permukiman tidak tertata
5. Lingkungan yang kurang nyaman karena tidak adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun *Public Space*

Permasalahan yang lain Kampung Tambaklorok tidak termasuk dalam desain polder sungai Banger, yang artinya sampai dengan akhir tahun 2014 belum ada rencana untuk melindungi daerah ini. Hal ini dapat berakibat pada masalah sosial dengan penduduk Kawasan Tambaklorok. Tidak masuknya Tambaklorok dalam Desain Polder Sungai Banger juga menunjukkan bahwa masalah penanganan banjir belum terselesaikan dan masalahnya justru akan meningkat dengan adanya *landsubsidence* (penurunan tanah).

B. Kedudukan Kawasan Tambak Lorok dalam RT RW Kota Semarang

Kampung Tambaklorok termasuk dalam kampung pesisir di Semarang, profesi nelayan mendominasi mata pencaharian warga di kampung tersebut. Wilayah pesisir yang berkembang tanpa arah mengakibatkan masalah di berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan lingkungan). Masalah yang

dapat dijumpai di wilayah pesisir diantaranya adalah kurangnya ruang terbuka hijau, kondisi sanitasi yang kurang layak, kurangnya kebutuhan air bersih dikarenakan air tanah sudah diintrusi oleh air laut sehingga membutuhkan teknologi pengolahan air. Selain itu, karakter warga disana yang selalu ingin bersama keluarga mengakibatkan kepadatan penduduk meningkat. Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ketergantungannya akan sumber daya pesisir karena mata pencaharian penduduknya yang bergantung pada laut. Mata pencahariannya bersumber dari laut, mereka memilih untuk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Potensi dan sumber daya alam di kawasan pesisir yang beraneka ragam menjadi daya tarik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terbentuklah permukiman pesisir yang bervariasi sesuai dengan tingkat penghidupan masyarakatnya.

Dalam sistem Kota Semarang, perencanaan kawasan tidak dapat terlepas dari RTRW Kota Semarang sebagai pedoman perencanaan kota. Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011/2031 mengatur tentang arahan perencanaan kawasan. Berdasarkan RTRW Kota Semarang, Kawasan Tambaklorok termasuk ke dalam wilayah BWK III dan merupakan bagian dari transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional. Rencana peningkatan kualitas pelabuhan juga didukung dengan penanganan masalah

rob dan penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mampu mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.

Kawasan Tambaklorok terletak tepat bersebelahan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan pelabuhan sekaligus kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota. Sehingga Kawasan Tambaklorok harus dapat mendukung fungsi pelabuhan laut. Beberapa arahan pengaturan kawasan sebagaimana diamanatkan didalam RT RW Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan;
- 2) Diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan
- 3) Mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.

Berkaitan dengan karakteristik masyarakat nelayan di Kawasan Tambaklorok, tentunya tidak dapat dilepaskan dari laut sebagai orientasi kawasan dan aktivitas utamanya. Lokasi yang berada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan tepat berbatasan dengan kolam pelabuhan, menyebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam aktivitas masyarakat nelayan dan pengembangan kawasan. Beberapa arahan pengaturan kegiatan laut pada kawasan sesuai dengan Pasal 112 ayat (3) antara lain adalah sebagai berikut :

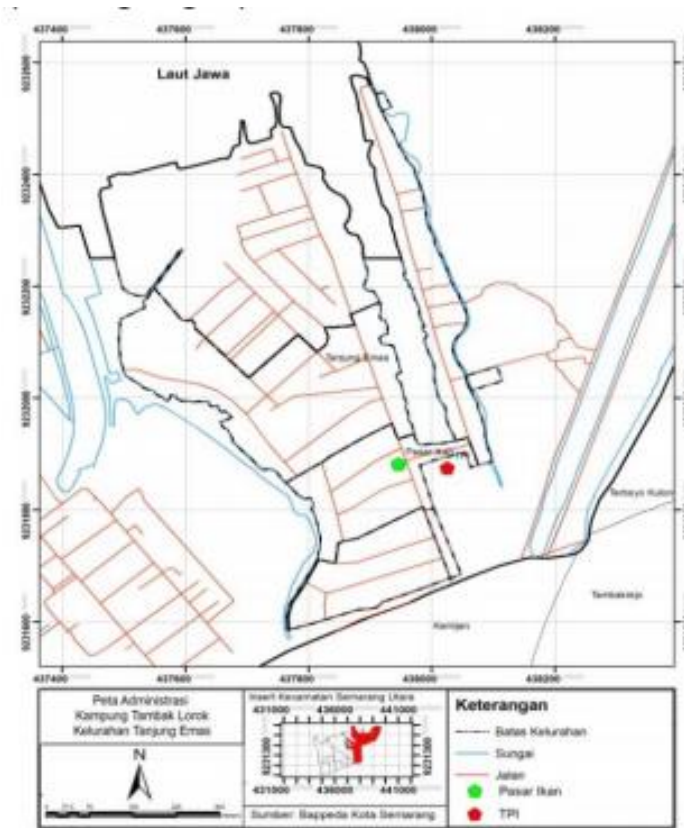
- 1) Dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
- 2) Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

- 3) Pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan;
- 4) Diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
dan
- 5) Kegiatan yang diizinkan di kawasan pelabuhan hanya yang mendukung fungsi kepelabuhanan.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, sehingga perencanaan Kawasan Tambaklorok harus mempertimbangkan perencanaan kawasan pelabuhan. Perencanaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pada masterplan Pelabuhan Tanjung Emas, telah diatur zonasi keruangan pelabuhan. Kawasan Tambaklorok direncanakan dengan fungsi sebagai kawasan pelabuhan rakyat. Meskipun lokasi Kawasan Tambaklorok berada di luar *break water* kolam pelabuhan. Jika dilihat secara lebih detail, maka kawasan Tambaklorok ini nantinya akan berada di luar *wall breakwater* dari kolam pelabuhan. Saat ini, pembangunan *wall breakwater* tersebut sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai terbangun di bagian barat. Jika *wall breakwater* ini selesai dibangun sepenuhnya, maka akses keluar masuk kapal nelayan harus dipertimbangkan. Kegiatan keluar masuknya kapal di kawasan kolam pelabuhan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak boleh terganggu oleh aktivitas lain.

Kegiatan nelayan ini harus dilaksanakan di luar kawasan kolam pelabuhan. Kondisi saat ini akses keluar masuk perahu nelayan masih melintasi kolam pelabuhan. Jika mengacu kepada masterplan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka ketika *wall breakwater* tersebut selesai dibangun akses perahu nelayan akan ditutup dan harus dipikirkan mengenai akses laut dari dan menuju Kawasan Tambaklorok. Berkaitan dengan Kawasan Pelabuhan, pada dasarnya lokasi bermukimnya masyarakat di Tambaklorok dahulu merupakan lahan milik pelabuhan, yaitu PT. Pelindo. Sementara itu, di lain pihak masyarakat sudah banyak yang memiliki status lahan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2015, pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas telah menerbitkan pelepasan hak dari Hak Pengelolaan Lahan bagi lahan yang telah bersertifikat hak milik.

Kampung Tambak Lorok merupakan salah satu perkampungan nelayan yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa. Fungsi utama kampung Tambak Lorok sebagai kawasan pemukiman, tambak dan perdagangan khusus hasil laut. Kampung Tambak Lorok terletak di Kelurahan Tanjung Mas di kecamatan Semarang Utara. Kampung Tambak Lorok terletak dekat wilayah penghubung kegiatan fungsi-fungsi utama Kota Semarang, seperti kawasan pelabuhan (Pelabuhan Tanjung Emas), pergudangan, pusat kota lama, Stasiun Kereta Api Tawang serta pusat pemukiman. Keberadaan kawasan pesisir memiliki arti yang strategis. Salah satu prioritas pengembangan di wilayah pesisir antara lain peningkatan permukiman pesisir.



Gambar 4.6. Peta Administratif Kawasan Tambak Lorok

Kawasan Kampung Tambak Lorok merupakan salah satu wilayah permukiman yang terletak pada wilayah pesisir Laut Jawa, dengan terletak pada Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Dari hasil pengamatan dan wawancara pada pihak Kelurahan Tanjung Mas, menjelaskan bahwa Kampung Tambak Lorok terdiri dari 5 RW pada Kelurahan Tanjung Mas, yaitu pada RW 12 hingga RW 16. Masyarakat masih menerima dan menganggap tokoh pemimpin di masyarakat, baik itu Ketua RT, RW, maupun Lurah setempat sebagai acuan dan panutan dalam bermasyarakat. Hal ini menunjukkan sistem hierarki kepemimpinan di masyarakat tetap bersumber pada tingkatan-tingkatan kepemimpinan,

sehingga mendatangkan sisi Adanya kepemimpinan yang masih banyak berperan dan pengakuan oleh masyarakat menjadi modal tersendiri bagi kesiapan masyarakat Tambaklorok dan RW 16 pada khususnya, dimana masyarakat dapat memiliki arah pembangunan yang jelas dan tersinkronisasi dengan kebijakan dari pemerintah setempat, melalui media pemimpin setempat. Seperti pada permohonan warga salah satu peserta ketika diskusi kegiatan rencana pembangunan wahana Apung ini agar supaya tanggung jawab perawatan wahana ini diserahkan pada kepemimpinan Pak Lurah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga pada Kampung Tamak Lorok mengatakan bahwa “Kalau kita nanti bingung, kalau Pak Lurah mungkin bisa dianggarkan darimana karena Pak Lurah tahu listrik yo mbayar. Kalau memang nanti ada air, air juga mbayar. Jadi, maksukan saya pengelolaan biar dikelola pihak Kelurahan”. Dari pernyataan masyarakat tersebut ada beberapa hal dimana kerja sama para pemimpin daerah dan warga belum bisa terjalin dan bekerja baik, sehingga proyek yang bertujuan untuk mensejahterakan warga pun menjadi terhambat. Selain itu juga terdapat kebingungan warga mengenai tokoh yang dipercaya, yaitu adanya pengalaman dengan pemimpin yang tidak baik dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Aspek kepemimpinan menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat menerima suatu kegiatan atau teknologi dengan lebih terarah dan terstruktur, serta mempermudah pengendalian masyarakat menanggapi isu, permasalahan, ataupun jika terjadi konflik masyarakat. Adapun di RW 16

Tambaklorok, figur pemimpin dipegang oleh pimpinan setempat yaitu Ketua RT. Pada tingkat yang lebih tinggi, peran kepala desa (Lurah) sangat tinggi, terutama dalam menengahi permasalahan. Berdasarkan kondisi kepemimpinan yang ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa RW 16 Tambaklorok masih memiliki peran figur pemimpin lokal yang masih diikuti masyarakat, serta musyawarah dan pertemuan yang masih berjalan walaupun tidak dilakukan secara rutin. Hanya saja, di RW 16 terdapat kemungkinan masyarakat dapat terpecah apabila peran masing-masing pemimpin lokal (Ketua RT) terlalu besar, sehingga dikhawatirkan muncul gap antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, diketahui bahwa Kampung Tambak Lorok merupakan Kawasan Permukiman yang terletak pada kawasan pesisir, dan warga pada Kawasan Tambak Lorok banyak yang berprofesi sebagai nelayan serta sentra pengolahan ikan. Sentra produksi pengolahan ikan dan perdagangan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan, juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan. Program Nasional Minapolitan mengangkat konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan struktur :

- a. Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah: Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi.

- b. Kawasan Ekonomi Unggulan Minapolitan : Setiap Propinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan.
- c. Sentra Produksi : Setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan kegiatan lainnya yang saling terkait.
- d. Unit produksi/usaha : setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku-pelaku usaha perikanan produktif.

Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata,
- c. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentrasentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa kawasan Tambaklorok sebagai satu kampung yang ada di kawasan pesisir, tentunya kegiatan perekonomian sangat erat dengan melaut. Sebagian masyarakat di RW 16 Tambaklorok masih bekerja sebagai nelayan, walaupun sudah banyak berkurang. Nelayan di Tambaklorok biasanya melaut pada musim-musim tertentu, dengan hasil tangkapan kebanyakan adalah udang dan cumi. Karena beberapa kendala operasional, sebagian masyarakat mulai

beralih pada kegiatan ekonomi yang lain. Kendala yang dihadapi nelayan adalah besarnya biaya operasional, sedangkan tangkapan tidak menentu. Selain sebagai nelayan, masyarakat di Tambaklorok khususnya di RW 16 memiliki beberapa alternatif pekerjaan yang lain, yaitu bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang, penjahit dan konveksi, serta pengolah hasil laut, diantaranya pembuat terasi udang dan bandeng presto. Segala bentuk usaha yang dijalankan oleh beberapa warga Tambaklorok, tentunya mempunyai penghasilan yang berbeda-beda. Sedikit demi sedikit mereka pun semakin berkembang dalam menjalankan usahanya, walaupun ada pula yang masih berharap agar usahanya semakin maju lagi dengan sumber daya yang mereka miliki. Udang, cumi-cumi serta bandeng presto yang merupakan sumber unggulan mereka, diharapkan dapat menjangkau hingga ke luar daerah Tambaklorok.

C. Strategi Pemerintah Kota Semarang terkait Penataan dan Pengembangan Kawasan Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari

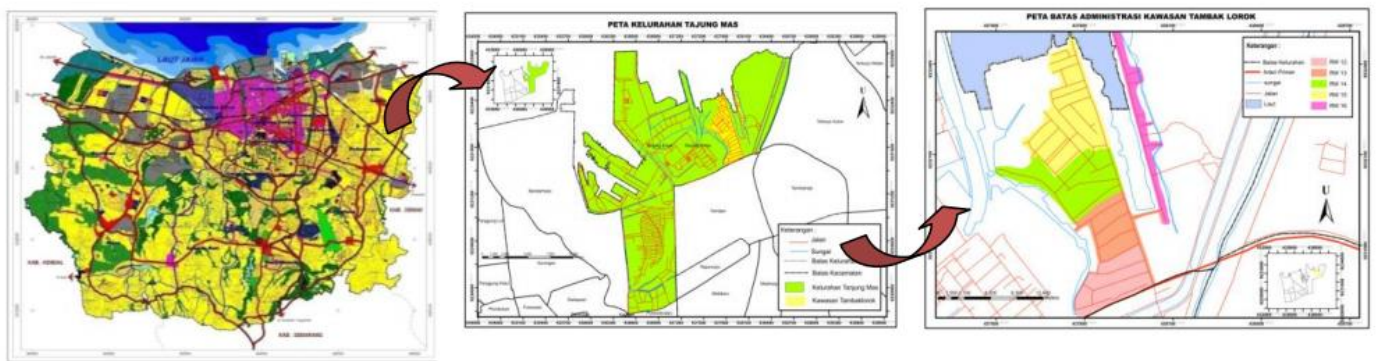
Kampung Bahari terletak di Kawasan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kawasan dengan luas wilayah +84,48 ha ini berkembang sebagai perkampungan nelayan terbesar di Kota Semarang sejak tahun 1950. Perkampungan nelayan Tambaklorok terletak di lokasi strategis ekonomi Kota Semarang, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang termasuk dalam kawasan perekonomian penting bagi Kota Semarang. Upaya penanggulangan masalah di Kawasan

Tambaklorok dilakukan melalui program Kampung Bahari, yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang merupakan dasar acuan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Kawasan Tambak Lorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas. Keberadaan Kawasan Tambak Lorok juga sangat penting terhadap Kelurahan Tanjung Mas, karena Tambak Lorok dikenal dengan sebutan kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan kampung di mana masyarakatnya sebagian besar sebagai nelayan. Dalam perencanaan pembangunan kawasan Tambak Lorok yang menjadi proyek dari Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2016 telah berhasil menjalankan beberapa rencana proyek seperti penataan PKL, retribusi pasar, pembangunan ruang terbuka hijau, serta pembangunan jalan di wilayah sekitar Kawasan Tambak Lorok. Pembangunan Kawasan Tambak Lorok yang diharapkan akan menjadi Kampung Wisata Bahari dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, hal tersebut juga merupakan harapan dari masyarakat disekitar Kawasan Tambak Lorok.

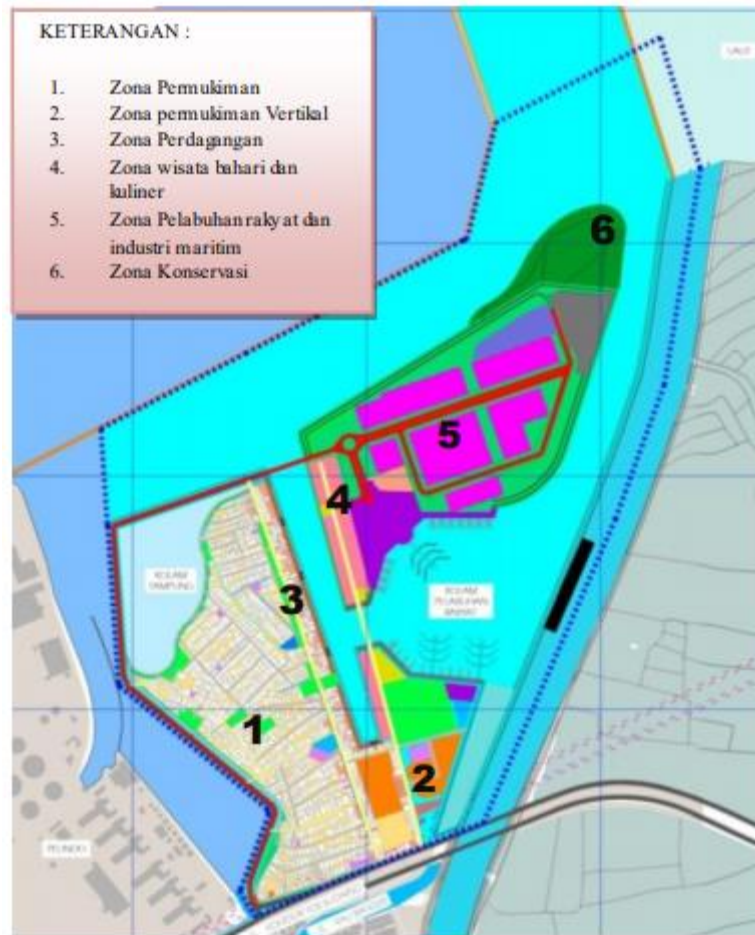
Jumlah penduduk di Tambak Lorok sebesar 9.503 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk yaitu 4.373 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 5.130 jiwa adalah penduduk perempuan. Mata pencaharian masyarakat Tambak Lorok hampir sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan (37 %) dan pedagang (28%). Masyarakat sebagai pelaku industri rumah tangga seperti pengasapan dan pengasian ikan, pengeringan hasil laut, dan juga

pedagang ikan basah. Kawasan Tambak Lorok yang dijadikan obyek penelitian dibatasi pada tingkat RW, yaitu 5 RW meliputi RW XII, RW XIII, RW XIV, RW XV, dan RW XVI. Lokasi penelitian tersebut adalah sesuai dengan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah yang akan direncanakan pengembangan kampung wisata bahari.



Gambar 4.7. Peta Konstelasi Tambak Lorok

Penataan Kampung Tambak Lorok memiliki beberapa konsep yang diajukan untuk menjadi kampung wisata bahari. Saat ini sudah terdapat konsep dan pembagian zonasi untuk rencana pengembangan kampung wisata bahari. konsep tersebut adalah untuk menata kawasan berdasarkan keterkaitan erat antara fungsi permukiman bahari sebagai zona utama dengan industri kelautan, pariwisata dan area penyangga ekologis. Selain itu juga untuk merekonstruksi pola struktur kawasan berdasarkan rekayasa jejalur pelayaran kapal nelayan dan berbagai upaya perlindungan terhadap ancaman banjir. Pada pengembangan tersebut juga menerapkan tema spesifik pada bagian kawasan yang dinilai tepat sebagai generator aktivitas kawasan. Berikut adalah ilustrasi zona-zona pengembangan kampung wisata bahari.



Gambar 4.8. Zona-Zona Kampung Wisata Bahari

Berdasarkan gambar 4.8 maka pengembangan Kawasan Tambak Lorok sebagai kampung wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi beberapa zona, di mana masing-masing zona memiliki fungsi atau konsep sendiri-sendiri. Pada ilustrasi diatas ditunjukkan bahwa nomor 2 memiliki zona sebagai permukiman vertikal. Masyarakat Tambak Lorok sudah mengetahui akan adanya pembangunan hunian susun tersebut, beberapa dari mereka ada yang setuju dan tidak setuju karena bagi mereka akan sangat jauh untuk melaut jika pindah hunian. Sedangkan untuk zona 3 adalah sebagai

sarana perdagangan, yaitu tepat berada di sepanjang RW 14 dan RW 15. Sebelumnya memang sarana perdagangan seperti pasar dan TPI sudah berada disana, akan tetapi pada rencananya akan dibuat lebih geser ke kiri Jl. Tambak Mulyo karena adanya pelebaran jalan.

Aksesibilitas merupakan aspek terpenting dalam sebuah permukiman. Aksesibilitas adalah keterjangkauan yang digunakan seseorang untuk bepergian. Rencana yang akan dibangun untuk aksesibilitas bagi permukiman Tambak Lorok sangat beragam. Tujuan dari pembangunan aksesibilitas tidak menghilangkan akses utama pada permukiman tersebut, bahkan akan menambah akses baru untuk menuju lokasi wisata bahari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Kawasan Tambak Lorok sudah masuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pembangunan Kawasan Tambak Lorok sebagai Kampung Bahari sudah berjalan dari tahun 2015, yang sudah direncanakan dibangunnya tanggul pelindung dan jalan lingkar untuk permukiman warga, di Jl. Tambak Mulyo dan Jl. Tambak Rejo. Jalan lingkar tersebut akan menjadi jalan baru untuk menuju Kampung wisata bahari. selain itu juga akan dilakukan peningkatan jalan utama kawasan (Jalan Tambak Mulyo dan Jalan Tambak Rejo), meski saat ini kedua jalan tersebut sudah dilakukan perbaikan.



Gambar 4.9. Rencana Aksesibilitas Kampung Wisata Bahari

Kampung Bahari tidak semata-mata wilayah perkampungan pesisir yang bersih dengan infrastruktur serba memadai, tetapi sebuah wilayah pesisir yang juga memerlukan perangkat sosial dan budaya yang mampu mendukung Tambaklorok sebagai destinasi wisata kampung pesisir yang paripurna. Dalam konteks tersebut, kita patut berbangga hati bahwa modal sosial yang berupa sistem kegotongroyongan dan kelembagaan sosial di wilayah tersebut masih sangat kuat. Bahkan masih banyak ritual dan tradisi yang memungkinkan menjadi satu daya tarik sebagai Kampung Bahari di tengah-tengah modernisasi dan industrialisasi di wilayah Tambaklorok. Pada tataran itulah pembangunan Kampung Bahari memerlukan dua pendekatan sekaligus yakni infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma proyek yang hanya berorientasi pada hasil tidak dapat dikedepankan dalam

proses membangun Kampung Bahari. Warga Tambaklorok harus dilibatkan secara menyeluruh karena merekalah yang nantinya akan menjadi penggerak Kampung Bahari yang sesungguhnya.

Dalam pembangunan kampung bahari Tambaklorok, diperlukan kolaborasi antara stakeholder. Kegiatan multi-stakeholders ini membutuhkan koordinasi yang baik agar seluruh elemen dapat bersinergi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah, memerlukan bantuan dari masyarakat dan swasta guna menggapai harapan tersebut. Pembagian tugas pun disusun sedemikian rupa agar tidak ada kegiatan tumpang tindih, Pemerintah daerah bergerak dalam aspek rencana teknis, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan. Swasta terlibat aktif dalam penyusunan desain, pembangunan fisik, serta pemeliharaan, sedangkan warga harus menciptakan rasa memiliki kesadaran dan aktif merawat hasil pembangunan. Tambak Lorok saat ini dalam tahap pembangunan menuju kampung wisata bahari. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus memiliki rencana yang akan dibangun pada kawasan tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaksanaan program Kotaku dan masyarakat, untuk mensukseskan program tersebut harus ada komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keterlibatan (partisipasi) dalam perencanaan pembangunan secara konsisten dan substansif (bukan semata formalitas). Terlebih dalam proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga produk pembangunan

yang kemudian dihasilkan bukanlah produk yang jauh dari kebutuhan warga. Produk Unggulan Pemberdayaan masyarakat juga penting dalam konteks membangun dan menambah keahlian (*skill*) warga dalam satu desain wisata Kampung Bahari.

Dalam perencanaan yang lebih intens dalam pembangunan dan penataan kawasan Tambaklorok yang menjadi proyek bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang selaku pemangku wilayah *berawal* dari kunjungan Presiden Republik Indonesia pada Hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 ke Tambaklorok Kota Semarang, setelah mendengar keluhan dari perwakilan masyarakat Tambaklorok beliau memberikan arahan karena alur Sungai Banger lama kondisinya sudah dangkal dan lingkungan yang memprihatinkan sehingga menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk melakukan Normalisasi Alur Kali Banger Lama beserta tanggul pelindung dan drainase di kampung Tambaklorok Kelurahan Tanjungmas, Kec. Semarang Utara agar dapat dipakai untuk alur kapal nelayan, lebih lanjut kepada Gubernur Jawa Tengah dan Walikota Semarang untuk duduk bersama Menyusun perencanaan penataan kawasan dengan konsep awal pembangunan system drainase yang dapat mengamankan Kawasan permukiman dari banjir air rob.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

bersama Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) pada kurun waktu tahun 2015 menyusun dokumen perencanaan penataan Kawasan Tambaklorok berupa Dokumen *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan* (RTBL) Kawasan Tambaklorok. Dimana dalam proses menyusun Dokumen RTBL tersebut juga di komunikasikan dan di koordinasikan dengan Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali-Juana untuk menyiapkan design tanggul pelindung serta perbaikan drainase dan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyiapkan design penataan kawasan terutama untuk akses jalan utama dan revitalisasi pasar Tambak Mulyo.

Sebelum disampaikan pembahasan lebih lanjut mungkin perlu penulis sampaikan bahwa posisi penulis sejak awal berdinis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mulai tahun 2007 terlibat langsung permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya pernah mutasi dan berdinis di BBWS Pemali Juana dari kurun waktu tahun 2011-2014 dan kembali mutasi ke Pemerintah Kota Semarang di tahun 2014 akhir, dengan penempatan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang dan pada awal tahun 2017 mutasi Kembali ke Dinas Penataan Ruang yang secara kebetulan terlibat aktif dalam kegiatan di Tambaklorok.

Dalam konteks topik penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik maka penulis akan menyampaikan dinamika kebijakan publik yang diambil/ditetapkan oleh Pemerintah dan sampai sejauh mana tanggapan dari kelompok masyarakat yang terdampak atas kebijakan yang telah ditetapkan/diambil oleh Pemerintah. Sebagai gambaran atas konsep penataan

kawasan kiranya perlu kita lihat potret Kawasan Tambaklorok sebelum dilakukan perencanaan kawasan sebagaimana gambar foto udara di bawah ini:



Gambar 4.10. Potret Kawasan Tambaklorok Sebelum Dilakukan Penataan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pemali Juana yang bekerja untuk menyusun konsep penataan Kawasan Tambak Lorok telah menjelaskan bagian, aspek dan wilayah yang masuk dalam program Kotaku pada Kampung Tambak Lorok. Dalam kurun waktu 2015 secara paralel dari BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kota Semarang Menyusun konsep penataan Kawasan Tambaklorok sebagaimana penugasan dari Bapak Joko Widodo. BBWS

Pemali Juana dengan konsep Normalisasi Alur Kali Banger Lama beserta tanggul pelindung dan drainase di kampung Tambaklorok dan Pemerintah Kota Semarang dengan Konsep RTBL Kampung Bahari Tambaklorok.



Gambar 4.11. Konsep Perencanaan Kawasan Dan Zonasi Kampung Bahari Tambaklorok

Dalam RTBL sudah ditetapkan konsep dan pembagian “zonasi” untuk rencana pengembangan kampung wisata bahari. konsep tersebut adalah untuk menata kawasan berdasarkan keterkaitan erat antara fungsi permukiman bahari sebagai zona utama dengan industri kelautan, pariwisata dan area penyangga ekologis. Selain itu juga untuk merekonstruksi pola struktur kawasan berdasarkan rekayasa jalur pelayaran kapal nelayan dan berbagai upaya perlindungan terhadap ancaman banjir. Pada pengembangan tersebut

juga menerapkan tema spesifik pada bagian kawasan yang dinilai tepat sebagai generator aktivitas kawasan. RTBL Kampung Bahari Tambaklorok direncanakan dapat terealisasi minimal dalam jangka waktu \pm 30 Tahun terhitung sejak tahun 2016, sehingga apabila sesuai dengan perencanaan Kampung Bahari Tambaklorok akan terealisasi pada tahun 2046.



Gambar 4.12. Fokus Lokasi Penelitian atau Focus Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan atas beberapa program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas memerlukan dua pendekatan sekaligus yakni

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma kegiatan yang hanya berorientasi pada hasil tidak dapat dikedepankan dalam proses membangun Kampung Bahari. Warga Tambaklorok harus dilibatkan secara menyeluruh karena merekalah yang nantinya akan menjadi penggerak Kampung Bahari yang sesungguhnya. Proses pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari keterlibatan (partisipasi) dalam perencanaan pembangunan secara konsisten dan substansif (bukan semata formalitas). Terlebih dalam proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga produk pembangunan yang kemudian dihasilkan bukanlah produk yang jauh dari kebutuhan warga. Sebelum disampaikan hasil dari kegiatan implementasi kebijakan terlebih dahulu akan kita paparkan gambaran awal kawasan sungai mati Banger sebelum dibangunnya tanggul/sitpile U yang dilihat dari hasil foto udara.



Gambar 4.13. Foto Udara Kali Banger mati sebelum dilakukan penataan

Dari gambar 4.13 jelas terlihat bentuk tepian kali Banger mati sangat tidak beraturan dikarenakan para penduduk memperluas lahan bagian belakang yang ditempati dengan sedikit demi sedikit menimbun lahan

perairan dengan material seadanya sampai muncul daratan baru dan diperparah dengan warga nelayan justru berlomba-lomba membuat dermaga tambat perahu sendiri-sendiri.

Apabila kita cermati secara seksama kebutuhan lahan baik secara keseluruhan maupun secara parsial maka masuk dalam katagori pengadaan lahan skala kecil, dikarenakan masih di bawah 5 Ha, sehingga untuk pengadaan tanah/lahan dari ketiga kegiatan di atas dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD dimana untuk pengadaan tanah revitalisasi pasar dan pembangunan jalan inspeksi dan RTH dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang, Dan untuk pengadaan lahan untuk peningkatan jalan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Hanya permasalahan awalnya adalah proyek kegiatan fisik dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis (Satker PKPS) dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR hadir/kontrak pada pertengahan tahun 2017 dimana saat itu Pemerintah Kota belum menganggarkan anggaran pembebasan lahan di APBD murni 2017. Dan dalam pengajuan anggara pada APBD Perubahan di tahun 2017 juga tidak maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan koordinator pelaksanaan Program Kotaku dan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan perencanaan Kampung Bahari pada Kawasan Tambak Lorok Semarang dilakukan analisis dan identifikasi lahan yang nantinya menjadi bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dari penjelasan koordinator pelaksanaan Program Kotaku dan Pemerintah Kota Semarang

Kawasan Tambak Lorok akan dibuat beberapa wilayah khusus seperti wilayah wisata, pusat perbelanjaan, kawasan permukiman, dan lain sebagainya. Untuk luas pasar yang dibutuhkan adalah 2.969 m² dengan jumlah ± 30 bidang/lahan yang ada disana. Untuk rencana lokasi pasar, lahan yang terdampak adalah keseluruhan bangunan yang ada disana, sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau ini merupakan lahan yang masuk dalam 6-14 meter setelah pekerjaan sheetpile. Untuk pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Tambak Lorok mempunyai panjang ± 800 m dengan jumlah ± 40 lahan yang ada disana. Berikut gambaran rencana lokasinya untuk Pasar dan gambaran pembuatan Pasar :



Sumber : Analisis Konsultan, 2017

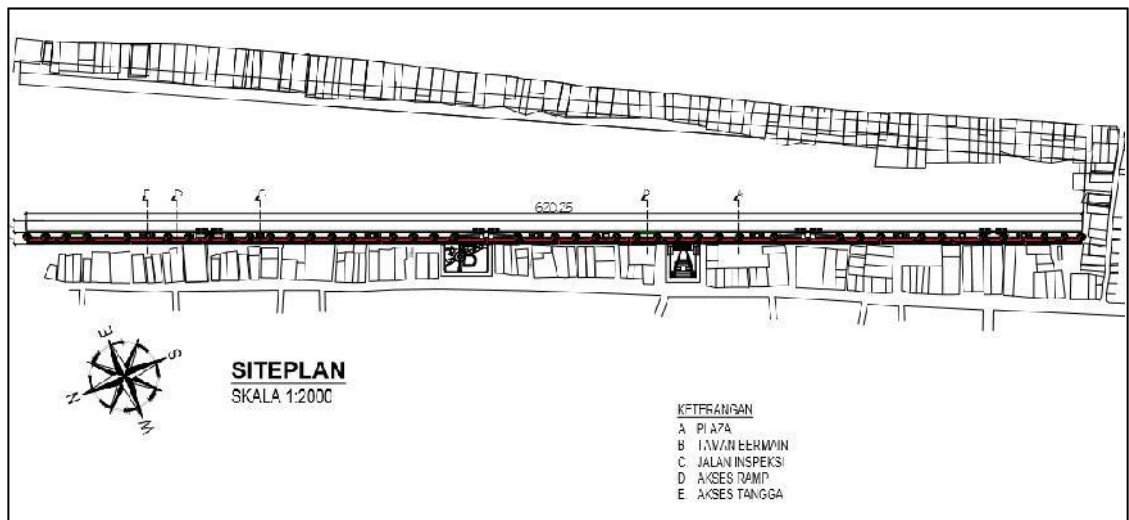
Gambar 4.14. Lokasi Rencana Pasar

Selain pembuatan pasar tradisional pada Kawasan Tambak Lorok juga dibuatnya Ruang Terbuka Hijau yang cukup luas untuk menjaga lingkungan yang lebih asri dan nyaman. Sesuai dengan pernyataan dari koordinator pelaksanaan Program Kotaku dan Pemerintah Kota Semarang Ruang Terbuka Hijau juga sudah masuk tahapan perancangan desain dan lokasi pembuatannya.



Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.17. Lokasi Rencana RTH



Sumber: DED RTH Tambak Lorok

Gambar 4.18. Siteplan RTH

Program Kotaku merupakan platform program yang bersifat Kolaborasi, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Nasional pembangunan wilayah permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yaitu menciptakan permukiman perkotaan yang layak huni dengan mengentaskan permukiman kumuh hingga 0 hektar. Program ini berfokus pada pengentasan permukiman yang layak huni tanpa menggusur. Program ini di buat untuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.



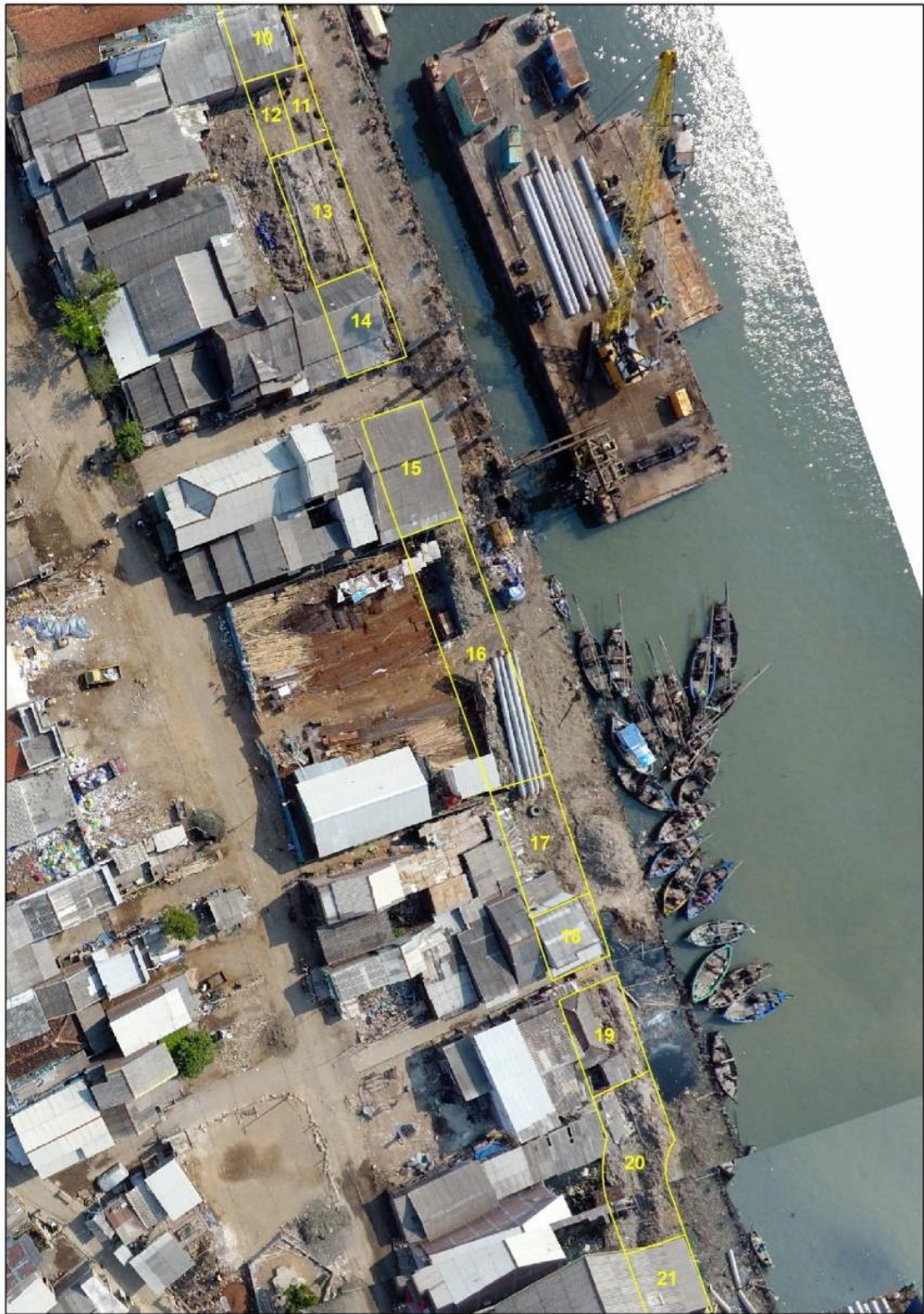
Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.19. Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek Pasar



Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.20. Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 1



Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.21. Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 2



Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.22. Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 3



Sumber: Analisis Konsultan, 2017

Gambar 4.23. Bidang Tanah Yang Akan Terkena Proyek RTH Potongan 4

Permasalahan yang kemudian berkembang bahwa pengelolaan kawasan bahari secara potensial, belum diimbangi oleh sistem pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hal ini disebabkan dalam perkembangannya terjadi berbagai permasalahan karena pengelolaan kawasan pesisir Tambak Lorok dengan aktifitas melaut, budidaya rumput laut dan pariwisata ternyata juga mempengaruhi keberlangsungan ekosistem yang ada di bawah laut. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi ancaman terhadap sumberdaya pesisir, hal ini dapat dikaji dari pandangan beberapa pakar, diantaranya: ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah Asia Tenggara merupakan yang paling terancam di dunia. Permasalahan lingkungan merupakan isu internasional yang sedang ramai dibicarakan, khususnya di era globalisasi, semua negara dituntut untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak demi kelestarian sumber daya alam bagi umat manusia di masa mendatang. Perubahan pada proses alami ekosistem akan mempengaruhi peran dari jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Setelah mengetahui kesesuaian perairan dan daya dukung kawasan yang dimiliki, langkah pendekatan pengelolaan kawasan Kampung Tambak Lorok berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya kelautan, perikanan, dan jasa-jasa lingkungan yang ada berdasarkan karakteristik kesatuan ekologis secara terpadu untuk aktivitas yang ada di kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok. Hal ini dilakukan dengan suatu penataan ruang yang diatur berdasarkan fungsi kawasan untuk menjamin keutuhan ekosistem yang mengacu pada kesesuaian perairan dan daya dukung kawasan dengan

melakukan pembagian zonasi. Pemahaman perencanaan spasial, zonasi penggunaan lahan sering diartikan sebagai penataan ulang guna lahan.

Zonasi pada kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok perlu dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya pada kawasan ini cukup tinggi dan beragam kepentingan, sehingga dapat mencegah konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan tersebut, khususnya mencegah pemanfaatan sumber daya yang berlebihan bahkan dengan cara-cara yang destruktif. Sumber daya alam pada suatu kawasan tertentu akan lebih efektif dan efisien, jika di arahkan secara tepat dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal suatu kawasan. Alokasi ruang (zonasi) yang di dasarkan pada daya dukung ekologis, jaringan sosial-budaya, integrasi kegiatan sosial-ekonomi, pendekatan ekosistem dapat menjadi instrumen kebijakan utama untuk menjaga keamanan ekologis, keselamatan sosial-budaya, serta untuk menekan terjadinya potensi konflik pemanfaatan ruang akibat beragamnya kepentingan para pemanfaat sumber daya pada kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok.

Ekosistem alami pada kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok menjadi dasar pengelolaan dengan menyesuaikan pada jasa ekosistem (*ecosystem services*). Kegiatan yang dilakukan harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

1. Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara ekosistem wisata pesisir

- a. Mengelola sumber daya perikanan dan kelautan tanpa merusak atau membahayakan ekosistem.
 - b. Melestarikan hutan mangrove sebagai sabuk hijau kawasan pesisir untuk mencegah abrasi.
 - c. Mengelola kualitas dan kuantitas air yang baik yang dapat mempertahankan jumlah dan jenis biota perairan.
 - d. Keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kawasan pesisir.
2. Pemberdayaan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi wisata pesisir
- a. Mengembangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai potensi pesisir yang mampu memberikan penghasilan yang kontinyu (tidak musiman).
 - b. Mendorong berkembangnya usaha perdagangan dan jasa pendukung aktivitas wisata pesisir lainnya.
 - c. Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat seperti pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan wisata pesisir.
 - d. Menanamkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
 - e. Mengembangkan atraksi budaya setempat sebagai daya tarik wisata.
 - f. Melestarikan nilai-nilai adat/tradisi masyarakat pesisir.

3. Peningkatan jumlah pengunjung dilokasi wisata pesisir
 - a. Keindahan panorama pesisir pantai sebagai embrio atraksi wisata alam.
 - b. Kondisi fisik pantai yang menunjang kegiatan pengunjung dalam berwisata.
 - c. Terdapat fasilitas ekonomi yang mendukung daya tarik wisata.
4. Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan berkesinambungan sebagai daya tarik pengunjung.
 - a. Terdapat kebudayaan setempat yang dilaksanakan secara berkala sebagai daya tarik pengunjung.
 - b. Terdapat kehidupan khas bernelayan.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

Kampung Tambak Lorok juga merupakan salah satu Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sudah dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang yang belum terealisasi sepenuhnya. Namun, program tersebut dinilai masih kurang efektif karena perencanaannya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga pada awal pengerjaan, masyarakat sempat memberikan penolakan. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui program Kampung Bahari hanya dilakukan pada beberapa aspek, dimana hanya fokus pada aspek yang mendukung pengembangan wisata bahari. Padahal, penanganan permukiman kumuh membutuhkan kajian komprehensif yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik dari segi infrastruktur. Aspek sumber daya manusia (*social inclusion*) dan ekonomi (*economy inclusion*) juga merupakan perihal yang tidak bisa dipisahkan. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada Kampung Tambak Lorok terhambat oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Agustino, 2016). Berdasarkan hasil penjelasan dari implementor program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa ukuran dan tujuan Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sudah jelas, arah kebijakan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan

dasar di permukiman kumuh untuk mendukung perwujudan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan umum tersebut terkandung dua maksud.

- a. Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi Pemerintah Daerah.

Para Implementor juga menyampaikan Faktor yang mendukung Implementasi Program Kotaku ini adalah adanya ukuran yang jelas hal ini dituangkan dalam 7+1 indikator kumuh yang bersifat realistis sesuai kebutuhan serta mudah diimplementasikan. Penghitungan kumuh yang sudah disepakati oleh TIPP juga mempermudah kelancaran Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas. Penghitungan skor kumuh dibawah angka 19 dinyatakan bebas kumuh atau 0% kumuh.

Faktor yang jadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan adalah data wilayah kumuh di Kelurahan Tanjung Mas tidak update sehingga tujuan kebijakan Pemerintah berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar tidak dapat tercapai pada tahun 2019. Penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Semarang seluas 415,83 Ha. Luasan Kumuh terluas di Kelurahan Tanjung Mas 37,63 Ha. Tujuan ini tidak dapat tercapai di Kelurahan Tanjung Mas, karena masih ada ketidaksesuaian data wilayah yang masuk

delineasi kumuh, ada daerah yang di luar delineasi seharusnya masuk dalam wilayah program Kotaku dan perlu ditangani, bahkan daerah yang di luar delineasi itu dirasa jauh lebih kritis daripada daerah yang di dalam delineasi, hal menyebabkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak seluruhnya, untuk menanggulangi hal tersebut pihak Kelurahan mengantisipasinya dengan memasukkan wilayah yang tidak masuk delineasi kumuh ke dalam pengajuan program Kelurahan yang diajukan saat Musrenbang.

2. Sumber Daya

Menurut Sutrisno (2014), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Proses implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya lain selain sumber daya manusia yang perlu diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para implementor program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa salah satu faktor pendukung Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas yaitu memiliki Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang kompeten. TIPP sudah memahami visi dan misi program Kotaku. Sebelum Implementasi Program Kotaku, dilakukan bimbingan teknis dan pelatihan

kepada para implementor dan TIPP. Pada saat implementasi Program Kotaku berjalanpun dilaksanakan bimbingan teknis secara berkala yang bertujuan untuk menjalin kordinasi dan persamaan persepsi terkait penanganan kawasan kumuh. Pelatihan TIPP, Korkot (Koordinator Kota), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Sekretaris BKM diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Pelatihan dan bimbingan teknis juga diberikan kepada para tukang yang mengerjakan proyek di lapangan. Pelatihan lain yang diberikan yaitu pelatihan komputer, pelatihan kepada Ibu-ibu PKK dan sebagainya. Selain kepada implementor, pelatihan dan penguatan kapasitas juga diberikan kepada organisasi dan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas yang diadakan oleh CSR, pihak pelabuhan dan pihak Indonesia power.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa saat implementasi program Kotaku, masyarakat berpartisipasi aktif memberikan swadaya sesuai dengan kemampuan. Swadaya tersebut dapat berupa konsumsi, tenaga dan uang, serta aktif dalam pengawasan di lapangan. Jika ada kendala masyarakat segera mendiskusikan kepada BKM dan pihak lain yang terlibat. Peran pemerintah juga aktif pada program ini, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, dalam wawancara disampaikan juga oleh Koordinator Kota program Kotaku bahwa Implementasi program Kotaku juga banyak

melibatkan pihak-pihak yang mendukung kelancaran program ini seperti PERKIM mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan dan perbaikan sanitasi, PDAM untuk menyediakan pelayanan air bersih, BLH untuk kebersihan lingkungan dan pengangkutan sampah, DKK memberikan fasilitas untuk kebersihan kota, DKK Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat.

Sumber daya lain yang sangat penting adalah anggaran. Anggaran mendukung kecukupan investasi dan mendukung tujuan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kota program Kotaku diketahui bahwa sumber pembiayaan Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah; World Bank, APBN, APBD, CSR dan Swadaya Masyarakat. Pembiayaan implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas mulai diajukan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 sebesar 1 M tiap tahunnya, terbagi menjadi 2 siklus setiap tahunnya. Tiap siklusnya 500 juta digunakan untuk perbaikan infrastruktur dengan kontrak kerja 90 hari kerja. Teknis pembiayaannya di bawah Perkim ditransfer ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Untuk teknis pencairan dana tidak bisa sekaligus, harus sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Pendamping Program Kotaku dan salah satu Ketua RW di kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa terdapat kendala saat pelaksanaan program, hal ini terkait dengan akses lingkungan yang sempit menyebabkan bahan-bahan material tidak bisa

diangkut sampai lokasi pengerjaan. Bahan-bahan material tersebut hanya bisa di turunkan di jalan besar, selanjutnya menggunakan songko ke dalam gang/ke lokasi pembangunan. Secara tidak langsung selain menghambat progress pekerjaan, juga menyebabkan adanya biaya tambahan untuk langsir material ke lokasi yang akan dibangun, sementara biaya tambahan untuk langsir material tersebut tidak termasuk dalam dana program, sehingga tidak jarang warga melakukan swadaya untuk biaya langsir tersebut.

Selain itu dari hasil wawancara dengan Ketua BKM Kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa sejauh ini mekanisme pencairan anggaran implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sudah sesuai panduan yaitu terdapat dua siklus tiap tahunnya. Satu siklus senilai Rp.500.000.000,- digunakan untuk infrastruktur dengan kontrak kerja 90 hari. Sejalan ini anggaran Implementasi Program Kotaku berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa kekurangan dalam anggaran, yaitu dana alokasi Implementasi Program Kotaku disamaratakan dengan Kelurahan lain, padahal Wilayah kumuh Kelurahan Tanjung Mas jauh lebih luas.

3. Karakteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Ketua Rw di kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa dalam Implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini opini publik sangat positif terhadap program Kotaku, hal ini dikarenakan mereka merasakan dampaknya langsung, program Kotaku dapat merubah wajah kelurahan

Tanjung Mas menjadi lebih baik. Masyarakat juga menyatakan sejauh ini program Kotaku sudah menjawab apa yang menjadi harapan mereka. Selain itu respon masyarakat terhadap para implementor juga sangat baik hal ini dibuktikan dengan keaktifan dan antusias masyarakat untuk berperan baik melakukan swadaya, maupun berpartisipasi aktif saat program Kotaku diimplementasikan.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Kota Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas diketahui bahwa sejauh ini kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kelurahan Tanjung Mas tidak begitu berpengaruh terhadap Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas. Karena pada dasarnya Implementasi Program Kotaku bersifat kolaborasi dan berbasis masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu memberikan sumbangan berupa uang, bahan material atau konsumsi, bisa memberikan sumbangan berupa tenaga. Kondisi sosial sangat mendukung Implementasi Program Kotaku yaitu dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat aktif dan antusias. Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas juga meningkat dengan adanya Implementasi Program Kotaku. Program Kotaku banyak memberikan perubahan pada masyarakat Tanjung Mas. Jalan yang sebelumnya becek dan rusak sehingga menghambat aktivitas masyarakat kini sudah sangat bagus dan lancar sehingga masyarakat yang memiliki usaha atau aktivitas

lain tidak terganggu. Dengan adanya Program Kotaku berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas.

Keanekaragaman latar belakang masyarakat Kelurahan Tanjung Mas membuat para implementor melakukan rangkaian pendekatan yang berbeda berdasarkan latar belakang masyarakat sesuai dengan latar belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi masyarakat sehingga Implementasi Program Kotaku dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dengan dukungan penuh dari Pemerintah.

D. Dampak Kawasan Kampung Bahari terhadap Masyarakat Tambak Lorok

Kawasan permukiman kumuh hingga saat ini sedang menjamur di beberapa wilayah, khususnya di daerah pesisir. Paradigma pesisir memiliki angka kemiskinan tinggi. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan sisi finansial memenuhi kebutuhan dasar primer. Kondisi prasejahtera memiliki wujud yang beragam, seperti: pendapatan belum memadai, kelaparan, tingkat kesehatan, keterbatasan pendidikan, tingkat kebersihan lingkungan maupun kondisi hunian yang tidak layak. Kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada kepadatan daerah hunian yang pada akhirnya berpotensi munculnya kantong-kantong permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian di mana kondisi secara fisik dengan kualitas yang tidak layak huni, masih belum tersedianya seluruh sarana dan prasarana, luasan terbatas, kepadatan tingkat tinggi, rawan penyakit sosial dan penyakit

lingkungan serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Permukiman kumuh identik dengan permukiman liar, yaitu orang yang hidup di darat maupun di kota tanpa memiliki izin, pada dasarnya permukiman ada karena adanya kehidupan, dan tujuan dari adanya permukiman untuk mencetak generasi baru dimasa mendatang dengan usaha melakukan perbaikan terhadap infrastruktur.

Pengembangan kampung bahari Tambaklorok dari analisis persepsi peneliti dari penjelasan dan pernyataan masyarakat kawasan Tambaklorok, terdapat beberapa aspek yang nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di kawasan Tambaklorok, antara lain :

1. Hunian

Hunian adalah tempat melakukan Kegiatan sehari-hari namun juga bisa memicu kenangan masa lampau dan akhirnya menciptakan ikatan psikologis antara manusia dengan lingkungannya (Halim, 2008). Kondisi hunian dapat dilihat dari material yang digunakan untuk membangunnya mulai dari pondasi, dinding, lantai, dan atap rumah. Bentuk dari sebuah hunian dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu hunian permanen, hunian non permanen, dan hunian semi permanen. Suatu hunian dapat dikatakan sebagai bangunan permanen dengan bahan material yang berupa semen, pasir, dan bata, sedangkan hunian dengan sebutan non permanen adalah hunian dengan bahan material dinding masih berupa kayu, dan sebutan semi permanen adalah gabungan dari keduanya. Berikut adalah kondisi hunian di Kawasan Tambak Lorok yang dapat

dianalisis setelah melakukannya observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat Kampung Tambak Lorok, yaitu :

Tabel 4.2 Material Hunian di Kawasan Tambak Lorok

No	Material Dinding Rumah	Jumlah Rumah (Unit)	Persentase
1	Kayu (Non Permanen)	9	10 %
2	Batu Bata (Permanen)	74	79 %
3	Kayu dan Bata (Semi Permanen)	11	12 %
Jumlah		94	100 %

Hunian dengan bahan material permanen memiliki persentase sebesar 79% dari total keseluruhan. Meskipun hunian sebagian besar sudah permanen tetapi masyarakat menyampaikan bahwa kualitas yang dimiliki berbeda. Mengingat Tambak Lorok akan dikembangkan kampung wisata bahari maka keberadaan rumah sangat penting terhadap pengembangan tersebut. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui program-program peremajaan hunian, seperti program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni (RTLH). Berikut adalah tabel jumlah perbaikan hunian yang telah dilakukan di Tambak Lorok.

Tabel 4.3 Perbaikan Hunian di Tambak Lorok

No	Perbaikan Hunian	Jumlah	Persentase
1	Pemerintah	18	19 %
2	Swadaya	76	81 %
Jumlah		94	100 %

Perbaikan hunian yang telah dilakukan di Tambak Lorok saat ini dapat dikatakan masih terlalu sedikit. Masyarakat Tambak Lorok menyatakan perbaikan hunian yang mendominasi adalah perbaikan

hunian secara swadaya, meskipun terdapat beberapa unit hunian yang diperbaiki oleh pemerintah. Banyak hunian yang termasuk ke dalam kategori tidak layak huni, akan tetapi belum mendapat perbaikan dari pemerintah. Dengan perbaikan hunian maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat, karena mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mampu melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

2. Kondisi Jalan

Jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat penting bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Jalan merupakan akses utama untuk mendukung Kegiatan sehari-hari masyarakat. Jalan utama memasuki Kawasan Tambak Lorok terbagi atas jalan Jl. Tambak Mulyo dan Jl. Tambak Rejo. Kondisi fisik jalan di Tambak Lorok memiliki lebar kurang lebih 3 meter dengan bahu jalan 1,6-1,8 meter. Dengan kondisi jalan seperti itu masyarakat menyatakan cukup sempit untuk melalui jika kendaraan saling berpapasan. Selain itu kondisi jalan di Tambak Lorok juga diperparah dengan adanya rob dan penurunan tanah (*land subsidence*) sehingga membuat kondisi jalan mengalami penurunan kualitas. Berikut adalah tabel perbaikan jalan yang dilakukan setiap RT di Tambak Lorok.

Tabel 4.4 Pavingisasi Jalan Per RT

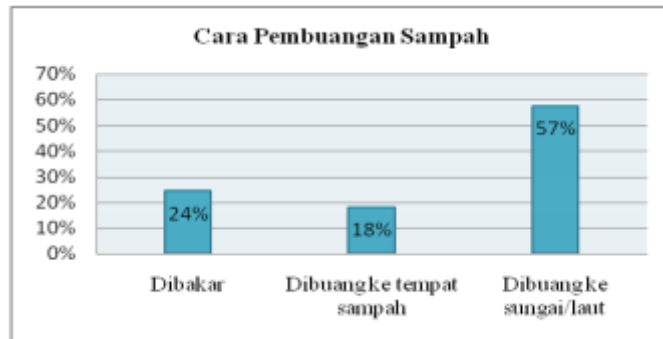
No	RW	Jumlah RT yang Dipaving	Total RT
1	XII	4	4
2	XIII	6	6
3	XIV	8	10
4	XV	7	9
5	VXI	5	5
Jumlah		30	34

Keberadaan jalan yang berada di Tambak Lorok saat ini sedang mengalami perbaikan. Beberapa jalan telah diperbaiki dari sisi bahan material yaitu berupa pavingisasi pada jalan kampung dan cor beton pada jalan lingkungan. Untuk saat ini pavingisasi belum merata pada semua jalan kampung, masih terdapat beberapa RT yang belum tertangani. Untuk perbaikan jalan lingkungan sudah selesai dilakukan pada Jl. Tambak Rejo, sedangkan untuk Jl. Tambak Mulyo perbaikan baru berjalan seperempat dari panjang keseluruhan.

3. Pengelolaan Persampahan

Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Keberadaan sampah di Tambak Lorok hingga saat ini belum tertangani dengan baik, hal ini disebabkan oleh masyarakat setempat yang belum peduli dengan kebersihan lingkungan. Sampah yang paling mendominasi pada kawasan ini adalah sampah hasil kegiatan perikanan. Sampah tersebut terlihat langsung di sepanjang jalan Jl. Tambak Mulyo yang merupakan akses utama di Tambak Lorok. Hal ini akan memberikan kesan buruk terhadap lingkungan, mengingat Tambak Lorok akan dikembangkan kampung wisata bahari. Berikut adalah diagram yang

menunjukkan cara masyarakat setempat membuang sampah pada kawasan Tambak Lorok.



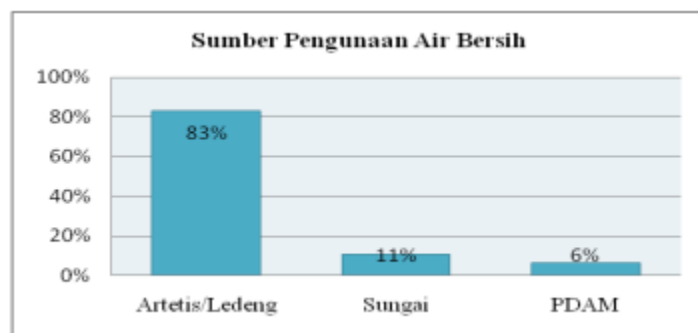
Gambar 4.24 Cara Pembuangan Sampah di Tambak Lorok

Pengelolaan persampahan seperti yang terlihat diatas menunjukkan kebiasaan masyarakat di Tambak Lorok. Sebesar 57% responden menjawab bahwa mereka dalam mengelola persampahan dibuang ke sungai/laut. Tambak Lorok akan dijadikan sebagai kampung wisata bahari maka keberadaan sampah akan sangat mengganggu jika tidak dikondisikan. Penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Salah satu aspek yang memengaruhi sehingga suatu kawasan dapat dikembangkan menjadi Kawasan wisata bahari adalah kualitas lingkungan yang bersih dan asri. Oleh sebab itu harus selaras antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Jaringan Air Bersih

Keadaan masyarakat pada pemukiman kumuh dikenal dengan syarat buruknya kualitas lingkungan dan kurangnya fasilitas pemenuh

kebutuhan hidup, salah satunya adalah kebutuhan akan air bersih. Masyarakat Tambak Lorok dalam pemenuhan kebutuhan air bersih cukup sulit untuk saat ini. Untuk sumber daya air berupa PDAM sudah masuk pada permukiman Tambak Lorok, namun belum mampu ditarik ke setiap rumah tangga. Selain itu, dikarenakan proses pemasangan PDAM pada tiap unit rumah tangga cukup sulit dan lama masyarakat lebih memilih menggunakan sumber daya air artesis. Berikut adalah gambar yang menunjukkan sumberdaya air yang digunakan masyarakat Tambak Lorok.



Gambar 4.25 Sumber Air Bersih Tambak Lorok

Penggunaan sumber air bersih di Tambak Lorok yang paling mendominasi bersumber dari air artesis. Air Tanah Artesis adalah air tanah yang letaknya jauh di dalam tanah, umumnya berada diantara dua lapisan yang kedap air. Masyarakat Tambak Lorok yang menggunakan sumber air artesis sebanyak 83%, yang artinya hampir sebagian besar sumber air di Tambak Lorok adalah artesis. Belum mampunya masyarakat untuk menarik PDAM masuk ke setiap rumah tangga menjadikan air artesis adalah alternatif lain. Mengingat Tambak Lorok

akan dikembangkan kampung wisata bahari, tentunya debit penggunaan air kedepannya akan lebih banyak lagi. Jika masyarakat setempat hanya mengandalkan air artesis sebagai air utama, kemungkinan kedepannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan air dalam pengembangan wisata bahari.

5. Kondisi Drainase

Jaringan drainase di Tambak Lorok merupakan bagian yang penting dari infrastruktur yaitu berfungsi sebagai saluran limpasan air. Saat ini kondisi drainase di Kawasan Tambak Lorok sudah baik yaitu dengan saluran drainase tertutup. Mengingat Tambak Lorok akan dikembangkan sebagai Kampung wisata bahari maka perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan drainase tersebut. Hulu dan hilir harus diperhatikan untuk pengembangan kampung wisata bahari yang pada dasarnya adalah wisata air. Dengan seperti itu kedepannya keberadaan wisata bahari tidak akan tercemar oleh sampah ataupun limbah yang mengalir melalui drainase menuju laut.

6. Kondisi Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi derajat kesehatan manusia. Sanitasi yang akan diangkat dalam pembahasan ini adalah MCK yang berada pada Kawasan Tambak Lorok. Masyarakat yang belum memiliki MCK pribadi melakukan kegiatan MCK di sungai atau sering yang disebut dengan istilah MCK Helikopter. Mengingat Tambak Lorok akan dikembangkan menjadi kampung wisata

bahari dengan wisata utama berbasis air, maka kebiasaan masyarakat yang melakukan MCK Helikopter akan menurunkan mencemari lingkungan. Berikut adalah rekapitulasi responden tentang penggunaan MCK untuk keperluan sehari-hari di Tambak Lorok.

Tabel 4.5 Penggunaan MCK di Kawasan Tambak Lorok

No	RW	Jumlah	Persentase
1	MCK Helikopter	18	19%
2	MCK Pribadi	63	67%
3	MCK Komunal	13	14%
Jumlah		94	100%

Sebanyak 67% responden menjawab bahwa mereka telah memiliki MCK pribadi. Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum memiliki MCK pribadi, mereka memiliki dua pilihan yaitu untuk melakukan MCK Helikopter atau MCK Komunal. Persentase masyarakat yang masih menggunakan MCK Helikopter sebesar 19% dari total keseluruhan, meskipun jumlahnya sedikit hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kekumuhan yang terus terjadi di Tambak Lorok. Kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat pada MCK Helikopter akan merusak kualitas lingkungan. Dengan kualitas lingkungan yang menurun akan memengaruhi terhadap pengembangan wisata bahari, karena pada dasarnya pengembangan wisata bahari membutuhkan lingkungan yang bersih dan asri.

Kompleksitas sosial budaya yang terjadi pada masyarakat nelayan, terutama berkaitan dengan beragamnya kelompok dan kategori sosial terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan sumberdaya dan

lingkungan laut serta beragamnya sektor mata pencaharian terkait laut. Fenomena budaya bahari akan mencakup semua fenomena dan untuk pembatasan dan penyederhanaan subjek kajian kiranya dilakukan fokus-fokus studi pada setiap atau beberapa fenomena sosial budaya yang kompleks tersebut. Hal tersebut telah memunculkan dinamika pranata sosial yang sangat mempengaruhi kepada kearifan lokal mereka. Kearifan lokal merupakan strategi adaptasi yang memang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri dalam membenahi masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal ini tumbuh dari hasil interaksi antara masyarakat dan lingkungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kampung Tambaklorok termasuk dalam kampung pesisir di Semarang, profesi nelayan mendominasi mata pencaharian warga di kampung tersebut. Melalui kebijakan Pemerintah Kota Semarang, Kawasan Tambak Lorok menjadi kawasan untuk menjadikannya kampung bahari. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Kampung Bahari terletak di Kawasan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kawasan Tambak Lorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas. Keberadaan Kawasan Tambak Lorok juga sangat penting terhadap Kelurahan Tanjung Mas, karena Tambak Lorok dikenal dengan sebutan kampung nelayan. Pengembangan Kawasan Tambak Lorok sebagai kampung wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi beberapa zona, di mana masing-masing zona memiliki fungsi atau konsep sendiri-sendiri.
- 2) Kawasan Tambak Lorok merupakan wilayah yang masuk dalam Program *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* yang merupakan program pemerintah pusat dimana Pemerintah Kota Semarang masuk dalam salah satu kota yang terpilih dalam program tersebut. Memang dalam observasi yang dilakukan bahwa progres mengenai Program Kotaku pada Kawasan

Tambaklorok masih belum terealisasi seluruhnya, hal tersebut disebabkan banyak kendala dan hambatan yang menyebabkan progres tidak dapat berjalan. Seperti perencanaan yang kurang efektif karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga pada awal pengerjaan, masyarakat sempat memberikan penolakan.

- 3) Permasalahan yang kemudian berkembang bahwa pengelolaan kawasan bahari secara potensial, belum diimbangi oleh sistem pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hal ini disebabkan dalam perkembangannya terjadi berbagai permasalahan karena pengelolaan kawasan pesisir Tambak Lorok dengan aktifitas melaut, budidaya rumput laut dan pariwisata ternyata juga mempengaruhi keberlangsungan ekosistem yang ada di bawah laut.

B. Saran

Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat hal ini dikarenakan program ini telah merubah wajah Kelurahan Tanjung Mas menjadi jauh lebih baik, mempermudah akses dan aktivitas masyarakat. Tanggapan masyarakat sangat positif terhadap program ini, mereka mengatakan bahwa program ini telah menjawab harapan masyarakat. Penulis berharap agar program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

1. Melakukan Updateing atau pembaruan data terkait wilayah yang masuk dalam deliniasi kumuh, agar program ini tepat sasaran dan dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Melakukan verifikasi ulang dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait kejelasan tentang sengketa lahan di Kelurahan Tanjung Mas, hal ini perlu dilaksanakan agar implementasi program Kotaku tidak terhambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
3. Dalam proses perencanaan program harus dipersiapkan dengan jauh lebih matang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun benturan antar program di lapangan, sehingga proses implementasi program Kotaku dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Diharapkan dengan adanya implementasi program kampung bahari yang dilakukan Pemerintah Pusat Bersama Pemerintah Kota Semarang, sesuai dengan konsep RTBL yang telah disusun sehingga wilayah Tambaklorok akan menjadi wilayah yang asri, sejuk, nyaman dan menjadi destinasi wisata lokal dan internasional.
5. Peningkatan sarana prasarana serta fasilitas yang terdapat di wilayah Kampung Tambaklorok untuk meningkatkan kualitas tempat wisata.
6. Diharapkan adanya pembenahan dan pemeliharaan kawasan Tambaklorok sebagai destinasi wisata bahari di Kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu.
- Agung, I Gusti Ngurah, 2004. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Edisi 1, Grafindo Persada, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Aziz Alimul, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika
- Bengen, D.G. 2004. *Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam Interaksi daratan dan Lautan : Pengaruhnya terhadap Sumber Daya dan Lingkungan, Prosiding Simposium Interaksi Daratan dan Lautan*. Diedit oleh W.B. Setyawan, dkk. Jakarta : Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Cicin-Sain dan Knecht (1998). *Integrated Coastal and Ocean. Management: Concepts and Practices*,. Island Press, Washington, D.C., 517 pp.
- Dahuri Rokhmin, dkk. 2001. *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- David, F.R. 2004. "Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Ketujuh". PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta : Unit Penerbitdan Percetakan STIM YKPN.
- Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Institut Teknologi. Bandung : ITB Press.
- La Sara. 2014. *Pengolahan Wilayah Pesisir*. Alfabeta. Bandung.
- Meffe, G.K. 1994. *Principles Of Conservation Biology*. Sunderland, MA : Sinaur and Associates.

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sutrisno, Edy. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Enam. Pranada. Media Group, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wheelen. T & Hunger. J. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, *Model-model dalam Kebijakan. Implementasi*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang